BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Dusun Tradisonal

Pemahaman terhadap dusun tradisional sangat bervariasi, hal ini terkait dengan konsep dan persepsi para ahli. Agar tercipta fokus pembahasan terhadap pengertian dari lokasi studi, di bawah ini akan diuraikan pengertian secara terpisah terhadap definisi dusun, wisata dan tradisional agar didapatkan pengertian dusun tradisional secara keseluruhan sebagai lokasi studi penelitian.

2.1.1 Pengertian dusun dalam lingkup desa

Bintarto (1983) menyebutkan bahwa desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya yang tertuang dalam kenampakannya di permukaan bumi yang tidak lain berasal dari komponen-komponen fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi. Kecirian fisik ditandai oleh permukiman yang tidak padat, sarana transportasi yang langka, penggunaan tanah persawahan. Kecirian lain berupa unsur-unsur sosial pembentuk desa, yaitu penduduk dan tata kehidupannya. Ikatan tali kekeluargaan di desa sangat erat *gemeinschaft* dengan perilaku gotong royong masyarakat sangat dominan.

2.1.2 Pengertian tradisional

Beberapa pengertian tradisional dapat dilihat sebagai berikut:

'Tradisional' adalah suatu kata atau istilah yang sangat sering digunakan dalam hal penelitian tata ruang. Sebagai suatu konsep, 'tradisional' sering digunakan secara tidak sadar dalam diskusi yang mempertentangkan modernisasai dengan cara tradisional. Pada umumnya, 'tradisional' diartikan sebagai 'sesuatu yang berasal dari masa lampau' atau 'sesuatu yang diwariskan' (Rapoport dalam Krisna, 2005). Dalam hal ini 'tradisional' berkaitan dengan suatu perwujudan dari serangkaian lambang dan tata laku/kebiasaan yang dipilih untuk mewakili kontinuitas

2.2 Tinjauan Aspek Kebudayaan dan Permukiman

Kebudayaan merupakan suatu tinjauan yang harus ditelaah untuk memahami karakteristik dari suatu dusun/desa yang masih memegang aspek budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tinjauan mengenai kebudayaan akan menjadi dasar untuk merekomendasikan suatu arahan pelestarian pada Dusun Senaru. Adapun yang akan menjadi pertimbangan adalah tinjauan mengenai hal-hal di bawah ini,sebagai berikut:

2.2.1 Pengertian budaya/kebudayaan

Uraian di bawah ini akan menjelaskan karakteristik dan bentuk kebudayaan dan usaha pelestarian kebudayaan.

Beberapa pengertian budaya atau kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Koentjaraningrat (1987:11) mengatakan bahwa kebudayaan adalah seluruh total pikiran, karya dan hasil karya manusia yang berakar kepada nalurinya dan dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar.
2. Pengertian kebudayaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997:130) adalah pikiran atau akal budi, kebudayaan atau yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang.
3. Kebudayaan menurut penjelasan UUD 1945 pasal 32 adalah (1) Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul dari buah hasil usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya; (2) Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa dan (3) Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

2.2.2 Karakteristik dan bentuk kebudayaan

Koentjaraningrat (1987:12) menyebutkan karakteristik atau bentuk kebudayaan sebagai suatu unsur-unsur yang universal. Unsur-unsur kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem religi dan upacara keagamaan, yaitu sistem kepercayaan dengan segala bentuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan, yaitu adanya tatanan masyarakat yang mempunyai pola hubungan tertentu.
3. Sistem pengetahuan, yaitu hasil daya cipta, karya dan karsa manusia.
4. Bahasa, yaitu alat komunikasi yang digunakan golongan masyarakat.
5. Kesenian, yaitu berbagai bentuk produk seni.
6. Sistem mata pencaharian hidup, yaitu sistem pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
7. Sistem teknologi dan peralatan, yaitu produk ciptaan manusia berdasarkan ilmu.

Unsur-unsur kebudayaan tersebut di atas, dalam kehidupan masyarakat selanjutnya akan terwujud menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut (Koentjaraningrat, 1987:11):

1. Kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan, norma-norma dan peraturan yang bersifat abstrak, disebut sebagai *culture system.*
2. Kebudayaan sebagai kompleks aktifitas kelakuan yang berpola dari manusia dalam masyarakat, bersifat lebih konkrit dan disebut sebagai *sosial system.*
3. Kebudayaan benda-benda hasil karya manusia (artefak), mempunyai sifat paling konkrit, dapat diraba, diobservasi dan didokumentasi, disebut sebagai kebudayaan fisik atau *physical culture*.

Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan makin terwujud pada bentuk yang konkrit dan teraga, yaitu dari *cultural system* ke *sosial system* dan akhirnya *physical system.* Senada dengan pendapat Koentjaraningrat (1987:11), Rapoport dalam Krisna (2005) menyatakan bahwa budaya sebagai suatu kompleks gagasan dan pikiran manusia bersifat tidak teraga. Kebudayaan ini akan terwujud melalui pandangan hidup (*world view*), tata nilai (*values)*, gaya hidup (*life style*) dan akhirnya aktifitas (*activities*) yang bersifat konkrit.

Pada suatu dusun wisata tradisional, pembentukan kebudayaannya juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut (Rapoport *dalam* Irawati, 1996:26):

1. Lokasi, yaitu keberadaan fisik diwujudkan dalam suatu lokasi.
2. Berhubungan dengan bentang alam, yaitu adanya unsur *landscape* dengan fungsi tertentu.
3. Mempunyai elemen yang khusus, yaitu terdapat unsur fisik khusus yang menjadi ciri.
4. Mempunyai letak yang khusus, yaitu penempatan ruang dengan maksud tertentu.
5. Mempunyai ruang dari tipe yang khusus, yaitu fungsi atau jenis ruang sesuai dengan kegunaannya.
6. Diberi nama dalam cara yang khusus, yaitu landasan pemberian nama pada unsur fisik kawasan.
7. Menggunakan sistem orientasi yang khusus, yaitu sistem orientasi sebagai landasan pembangunan fisik.
8. Mempunyai warna, tekstur dan sebagainya yang khusus, yaitu penggunaan warna, tekstur khas sebagai bagian karakter fisiknya.
9. Mempunyai suara, bau, temperatur dan gerakan udara, yaitu karakteristik fisik yang tidak terlihat.

10. Mempunyai orang yang pasti menarik dalam aktifitas yang khusus, yaitu pelaksanaan aktifitas masyarakat menarik perhatian karena kegiatan yang dilakukannya.

2.2.3 Kebudayaan Sasak

Pola Budaya Sasak (Fathurrahman dlm Seminar Lokakarya Rekonstruksi Budaya Sasak, 2000)

1. Penyelarasan antara sumber motivasi nilai dengan keyakinan keagamaan yang dianut sehingga terhindar dari perilaku budaya yang berstandar ganda
2. Menata sistem nilai dahn sistem sosial dengan simbol-simbol etnik berdasarkan referensi keyakinan keagamaan, sehingga sistem budaya berfungsi sebagai salah satu bentuk implementasi keagamaan
3. Menyelarasakan irama sistem teknis (sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dll) dengan tahapan budaya rasional dan peradaban yang global
4. Memelihara konsistensi hubungan antara sumber motivasi nilai, sistem nilai, sistem sosial dan sistem teknis yang melahirkan sosok budaya dengan integritas yang kuat, sejajar dengan bangsa lain, memiliki daya saing yang tinggi.

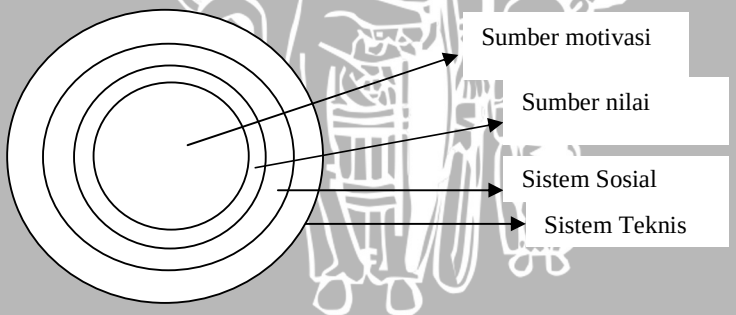

Gambar 2.1 Pola budaya Sasak

2.2.4 Unsur-unsur kebudayaan Sasak

Secara sosio-antropologis, Sasak adalah masyarakat desa yang hak-hak kemasyarakatannya telah diambil alih oleh kepentingan kekuasaan.

Secara umum realita kebudayaan Sasak dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tradisionalisasi

   Masyarakat Sasak tradisional masih menunjukkan pola feodalistik yang kuat, kepemimpinan paternalistik yang cenderung otoriter. Kondisi ini berpengaruh pada sistem pendidikan dalam keluarga dan pemebelajaran masyarakat.

2. Religiusitas

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Sasak adalah masyarakat Islam tradisional yang fanatik, Tradisi Pra-Islam tampak masih dipegang. Pola keagamaan yang cenderung fragmatis ini semakin kuat karena kepemimpinan Tuan Guru yang memperkuat pola "patron klien" dengan simbol-simbol primordialitas yang juga bercampur dengan pola-pola itos magis.

3. Modernitas

Dalam memasuki peradaban modern, masyarakat Sasak yang sebagian besar masih berpola mitos-magis ini menjadi masyarakat yang tertinggal dan salah memahami kehidupan modern. Masayarakat Sasak tampak sangat rentan terhadap dampak peradaban global karena tidak memiliki basisi kesadaran nilai yang kuat. Ketertekanan masyrakat dengan sistem tradisional maupun sistem birokrasi dan politis menyebabkan munculnya perilaku sublimatik dan kompensasi melalui gaya hidup materialistik yang telah merambah sampai pelosok pedesaan. Gaya-gaya hidup yang ditawarkan oleh sistem kapitalistis ditangkap sebagai jalan keluar persoalan statis dan strata sosial. Pola ini sekaligus telah melemahkan sistem nilai dan norma berbasis budaya maupun agama. Kualitas ekspresi, moralisasi, intelektualisasi dan pola kepemimpinan Sasak dalam memasuki peradaban modern belum mampu beradatasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu masih harus diperkuat dengan Sistem pendidikan masyarakat yang efektif baik melalui jalur formal, non formal maupun informal.

Adapun unsur-unsur kebudayaan Sasak akan dijelaskan di bawah ini:

a. Sistem religi pada masyarakat Sasak

Kegiatan beragama tidak mengalami perubahan seperti pelaksanaan Maulid Nabi, Lebaran Topat, serta pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Demikian pula pengaruh kyai dan Tuan Guru yang didirikan dengan kegiatan keagamaan, tak mengalami perubahan baik dalam suatu hajatan atau acara maupun dalam menentukan adat bangar (aturan perumahan dalam adat sasak)

Implikasi sistem religi terhadap masyarakat dapat dilihat dalam menentukan adat bangar yang mengatur hadap rumah serta mengatur letak pintu dan jendela pada rumah yang akan dibangun.

b. Sistem organisasi sosial pada masyarakat Sasak

Sistem organisasi sosial dapat dijelaskan terdiri dari sistem pelapisasn sosial dan sistem kepemimpinan, sistem kegiatan-kegiatan dalam siklus hidup, sistem

kekerabatan, sistem pewarisan, sistem-sistem tersebut sesuai dengan budaya yang ada dalam adat sasak.

c. Sistem kekerabatan pada masyarakat Sasak

Sistem kekerabatan menetukan struktur ruang permukiman. Sistem kekerabatan ini bagian yang penting untuk diketahui adalah jumlah keluarga, peran laki-laki dan perempuan, sistem perkawinan, pembagian warisan ataupun penggunaan ruang berdasarkan aturan keluarga.

1. Hubungan dalam keluarga inti

   Suku sasak mempunyai kebiasaan adat menetap setelah menikah (matrilocal) bersama orang tua baik laki-laki maupun perempuan tetapi yang sering dilakukan adalah tinggal di rumah pihak laki-laki karena itu termasuk keluarga inti (*nuclear family*), dalam adat suku Sasak adalah orang tua, saudara anak dan istri suami. Sesudah upacara perkawinan tempat tinggal pertama untuk pasangan baru menikah ialah di rumah orang tua suami. Pada umumnya mereka tinggal di rumah ini untuk selamanya, tetapi tidak ada untuk ketentuan jika pasangan baru berkeinginan untuk pindah dan membangun rumah di tempat lain, diusahakan agar masih berada dalam satu dusun atau desa, tidak ada untuk ketentuan untuk jarak yang lebih jauh jika orang tua tidak berkeberatan untuk melepas anaknya. Adat menetap setelah menikah bertujuan untuk memperat hubungan persatuan keluarga. Dalam adat Sasak, sistem kekerabatan ini dinamakan sistem keluarga batik yaitu bentuk-bentuk persatuan keluarga yang dilakukan untuk memperat hubungan keluarga.

2. Hubungan kerabat dengan tetangga

   Hubungan dengan kerabat sangat erat terlihat dalam pelaksanaan kegiatan adat perkawinan. Keluarga dari pihak ayah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan jumlah pembayaran adat, waktu pelaksanaan kegiatan sorong serah (upacara sitetis untuk menyerahkan kembali pengantin wanita pada pihak keluarga setelah dicari oleh pihak keluarga laki-laki sebagai simbol untuk melepaskan tanggung jawab orang tua kepada suami) dan nyongkol (iring-iringan pengantin menuju rumah pihak perempuan yang mengiring kegiatan sorong serah), menunjuk anggota keluarga yang hadir dan penyiapan segala perlengkapan upacara. Selebihnya kerabat tidak banyak memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga inti kecuali orang tua sudah meninggal dunia sehingga menjadi tanggung jawab keluarga dari pihak ayah yang tertua.

Hubungan dengan tetangga hanya terlihat dalam urusan dusun dan desa, seperti gotong royong atau kegiatan kampung serta kegiatan keagamaan tetangga terdekat akan dating dan membantu menyiapkan peralatan dan mengolah makanan. Dalam kegiatan sorong serah dan nyongkol tetangga dengan suka cita ikut dalam rombongan iringan pengantin.

2.2.5 Konsepsi permukiman dan pola permukiman

Permukiman merupakan bagian dari pemanfaatan ruang suatu wilayah secara keseluruhan. Permukiman muncul sebagai interaksi alamiah manusia untuk berlindung dari gangguan alam serta nalurinya sebagai makhluk sosial sehingga keberadaannya akan berkaitan langsung dengan pola kegiatan dan pergerakan masyarakat yang membentuknya. Pola pergerakan manusia dalam suatu permukiman dieksperikan dalam aktivitas yang berkaitan dengan ruang baik secara sadar ataupun tidak membentuk suatu rangkaian pola permukiman sebagai ekspresi dari nilai sejarah dan nilai sosial budaya yang berlaku disana.

2.2.6 Pengertian permukiman

Permukiman berasal dari kata “mukim” yang berarti tempat tinggal, sedangkan kata permukiman berasal dari kata benda yang berarti daerah tempat bermukim. Permukiman merupakan proses atau tindakan memukimkan proses di sini berarti urut-urutan perubahan peristiwa pada perkembangan sesuatu.

Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknik saja tetapi juga menyangkut aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya, dari para penghuni tidak haya menyangkut pada tempat hunian rumah.

2.2.7 Pengertian bermukim dan rumah (Samadhi, 2004 : 9)

Istilah-istilah berikut digunakan untuk memahami pola perilaku manusia terhadap tempat mereka bermukim/bertempat tinggal.

Bermukim merupakan suatu kegiatan primer manusia yang tidak hanya sekedar melibatkan keberadaan tempat bernanung, namun menurut Norberg-Schulz (1993 : 71), bermukim atau dwelling memiliki makna : 1) bertemu dengan pihak-pihak lain untuk melakukan kegiatan pertukaran barang, jasa, gagasan dan perasaaan, atau dengan kata lain mengalami kehidupan yang penuh dengan berbagai kemungkinan; 2) membuat perjanjian dengan pihak-pihak lain, yaitu kesepakatan atas nilai-nilai bersama; 3) menjadi diri sendiri, dalam pengertian memiliki dunia atau, secara sederhana, teritori pribadi. Kombinasi ketiganya merupakan esensi dari konsep ’bermukim’.

Dengan demikian, bermukim erat dengan tempat-tempat dan pola-pola ruang yang diciptakan oleh manusia untuk mewadahi kegiatan tempat hidupnya (yaitu kerja, rekreasi, bertempat tinggal) dan aspirasi/cara pandang hidupnya (yaitu aspek simbolik). Permukiman atau settlement dengan ruang-ruang perkotaannya merupakan tempat kegiatan bermukim secara kolektif dilakukan. Sedang rumah adalah tempat seseorang bermukim secara individual dan membentuk keluarga.

Di dalam menciptakan totalitas lingkungan bermukim, nilai-nilai bersama seperti misalnya: 1) adanya tempat khusus untuk melakukan transaksi perdagangan, seperti misalnya pasar; 2) adanya kesepakatan untuk mengangkat salah satu warga sebagai pimpinan informal suatu kelompok bermukim; 3) adanya lambang status sosial berupa penggunaan material bangunan tertentu (misalnya marmer) atau gaya arsitektur tertentu)misalnya joglo –untuk kaum bangsawan vs panggang pe –untuk orang kebanyakan –pada permukiman tradisional Jawa) pada bangunan rumah.; 4) adanya nilai-nilai atau pola-pola ruang tertentu, seperti misalnya ruang-ruang dikotomis luan-teben pada ruang permukiman Bali; 5) dan sebagainya adalah aspek-aspek secara turun-temurun ditularkan dalam kegiatan bermukim manusia. Dengan demikian tradisi bermukim adalah ’aspek-aspek dalam kegiatan bermukim yang diwariskan dari suatu individu ke individu lain dan dari satu generasi ke generasi lainnya.

2.2.8 Pengertian pola permukiman dan bangunan

Pola permukiman tidak dapat dipisahkan dari lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik, termasuk lingkungan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Bintarto (1969) mencantumkan dua tafsiran mengenai pola permukiman, Pertama dalam artian sempit memperhatikan susunan dan penyebaran bangunan, diantaranya adalah rumah; Kedua dalam artian luas memperhatikan bangunan, jaringan jalan dan pekarangan yang menjadi salah satu sumber penghasilan penduduk.

2.2.9 Pola permukiman dan bangunan sebagai salah satu wujud kebudayaan fisik

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Koentjaraningrat (1987) bahwa benda-benda hasil karya manusia merupakan wujud kebudayaan fisik, termasuk di dalamnya adalah permukiman dan bangunan tradisional. Pada dusun wisata tradisional, khususnya yang berada di daerah pedesaan, permukiman dan bangunan tradisional inilah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Rapoport *dalam* Wikantiyoso (1997:26) mengemukakan bahwa permukiman tradisional merupakan manifestasi dari nilai sosial budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai sosial budaya penghuninya, yang dalam proses penyusunannya menggunakan

dasar norma-norma tradisi. Lawson *dalam* Sasongko (2002:119) menambahkan bahwa beberapa norma-norma tersebut mungkin murni dari kesepakatan warga, tetapi sebagian besar lainnya adalah dari kebutuhan dan karakter masyarakatnya sendiri (sebelum perancangan disusun secara profesional), perancangan dan kreatifitas ruang lebih bersifat sosial dan verrnakular serta terlihat lebih memperhatikan aspek budaya. Sejalan dengan pendapat di atas, Wikantiyoso dalam Krisna (2005) juga menambahkan bahwa permukiman tradisional adalah aset kawasan yang dapat memberikan ciri ataupun identitas lingkungan. Identitas kawasan tersebut terbentuk dari pola lingkungan, tatanan lingkungan binaan, ciri aktifitas sosial budaya dan aktifitas ekonomi yang khas. Pola tata ruang permukiman tradisional sendiri mengandung tiga elemen, yaitu ruang dengan elemen-elemen penyusunnya (bangunan dan ruang di sekitarnya), tatanan *(formation)* yang mempunyai makna komposisi serta *pattern* atau model dari suatu komposisi.

Menurut Habraken *dalam* Wikantiyoso (1997:27), sebagai suatu produk komunitas, bentuk lingkungan permukiman merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang per orang. Artinya komunitas yang berbeda tentunya memiliki ciri permukiman yang berbeda pula. Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Donby *dalam* Sasongko (2002:117) yang menyatakan bahwa bagaimana suatu rumah dirancang dan suatu permukiman ditata menggambarkan hubungan antara individu, keluarga dan komunitasnya yang tentu saja bergantung pada masing-masing budaya. Konsekuensinya adalah organisasi ruang di rumah, tatanan permukiman dan akses ke fasilitas umum dipengaruhi oleh pandangan hidup komunitas tersebut.

2.2.10 Unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi dan membentuk suatu pola permukiman

Kebudayaan lahir semenjak manusia ada. Kebudayan merupakan produk manusia yang digunakan untuk mengatur kelangsungan hidup manusia, baik terhadap alam dan hubungan antar manusia, maka pada tahap selanjutnya segala tindakan manusia akan bergantung dan dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada dalam masyarakat pun manusia berada. Demikian pula pola-pola bermukim yang ada sangat dipengaruhi oleh kebudayaan.

Walaupun pengaruh kebudayaan terhadap pola-pola bermukim suatu masyarakat itu berbeda-beda akibat perbedaan kebudayaan, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi pola permukiman adalah peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem ekonomi, sistem sosial, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan sistem religi.

Ada beberapa faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan mengenai bentuk dan pola suatu rumah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kultur, perilaku dan religi (Haryadi *et. al*, 55-58):

1. Faktor Kultur

   Pendekatan *environmental determinism* terhadap rumah menekankan bahwa bentuk dan pola rumah merupakan konsekuensi yang wajar atau respon pragmatis terhadap situasi iklim dan lingkungan tempat rumah itu dibangun. Artinya bahwa bentuk-bentuk rumah tidak lain dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan bahan lokal untuk membentuk suatu bentuk tertentu. Bentuk rumah tradisional yang sangat bervarisi juga dipandang sebagai suatu konsekuensi wajar tersedianya material setempat. Rumah panggung misalnya, merupakan respon terhadap situasi dari tempat yang lembab, untuk mengatasipasi bahaya binatang liar, serta konsekuensi yang wajar mengenai penggunaan bahan kayu yang tersedia secara lokal.

   Pandangan ini dikatakan Rapopport sebagai simplikasi yang tidak tempatnya dikaitkan dengan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk rumah. Rapopport menekankan banyak kasus telah membuktikan bahwa pada suatu daerah dengan iklim sumber-sumber material yang sama, dijumpai berbagai bentuk rumah. Rapopport membuktikan bahwa pada suatu daerah dengan iklim serta sumber-sumber material yang sama, dijumpai berbagai bentuk rumah yang berbeda. Contoh mengenai hal ini tidak asing bagi kita di Indonesia, pada suatu region, dijumpai beragamnya bentuk dan pola rumah. Buku “Kopedium Sejarah Arsitektur Indonesia” telah menunjukkan betapa setiap kelompok etnis tertentu di Indonesia mempunyai konsepsi kultur yang berbeda tentang bentuk dan pola rumah dan perumahan.

2. Faktor Perilaku

   Faktor perilaku, terutama dipandang berpengaruh dalam pola rumah atau perumahan. Penelitian para penulis dikampung-kampung sepanjang sungai Coded di Yogyakarta menunjukkan bahwa keterkaitan antara lingkungan fisik dengan perilaku di kampung-kampung tersebut bersifat dielektik, dalam arti saling mempengaruhi. Hal ini menyebabkan proses interaksi antara penduduk kampung tinggi, yang secara tidak langsung menyebabkan pula tingkat solidaritas penduduk kampung tersebut meningkat. Sebaliknya dengan tingkat hubungan sosial yang sangat tinggi, penduduk kampung secara inkremental

melakukan aransemen lingkungan fisik agar dapat mewadahi berbagai kegiatan dan perilaku sosial mereka. Dengan kata lain perilaku dan lingkunga fikik pada kampung tersebut secara dielektik saling mempengaruhi dan akhirnya terwujudkan suatu pola penghidupan yang spesifik.

3. Faktor Religi

   Faktor religi atau kepecayaan, juga dipandang merupakan faktor yang sangat berperan dalam bentuk dan pola rumah, bahkan dalam masyarakat tradisional cenderung merupakan faktor yang dominan dibandingkan faktor yang lain. Dalam masyarakat tradisional, seringkali dipandang bahwa rumah atau perumahan merupakan wujud microkosmos dari seluruh alam semesta. Dalam konsepsi ini seringkali pola rumah atau permukiman dikategorikan dalam kelompok sakral dan profan.

Implikasi terhadap ruang dapat dilihat dari sistem kekerabatan ini adalah pola perumahan yang berbentuk kompleks keluarga, kompleks ni terdiri dari rumah orang tua serta rumah anak-anaknya yang tinggal bersama dengan anak (cucu ayah dan ibu) dan istri/suami (menantu ayah dan ibu) dalam batas kavling tanah yang dikelilingi tembok yang mengelilingi kelompok perumahan tersebut.

2.2.11 Konteks pergeseran/perubahan permukiman tradisional

Seiring dengan perkembangannya, permukiman-permukiman tradisional juga mengalami pergeseran atau perubahan. Menurut Altman (1980), faktor-faktor penyebab perubahan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar.

1. Pengaruh dari dalam

   Perwujudan suatu rumah disebabkan oleh adanya dorongan dari berbagai kebutuhan hidup manusia, sehingga perubahan kebutuhan atau kepentingan manusia itu sendiri akan menyebabkan adanya perubahan pada fisiknya.

2. Pengaruh dari luar

   Kebutuhan hidup seseorang senantiasa berkaitan dengan lingkungannya, sehingga perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan hunian disebabkan oleh pengaruh luar yang diterima penghuninya.

Aliyah dalam Krisna (2005) menambahkan bahwa perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi pada suatu permukiman tradisional disebabkan oleh adanya heterogenitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan pada fungsi bangunan; keberagaman etnis dan profesi yang mempengaruhi tatanan kehidupan dan pandangan hidup masyarakat; dan

tingkat kepadatan hunian yang tinggi mempengaruhi tradisi atau budaya bermukim, tatanan sosial budaya serta tata fisik lingkungan.

2.2.12 Tinjauan mengenai permukiman Sasak

A. Permukiman Sasak

Masyarakat Sasak pada umumnya hisup secara berkelompok mulai dari rumpun keluarga, secara luas menjadi *repoq*, beberapa *repoq* menjadi dusun atau dasan, dan beberapa dasan menjadi desa membentuk perkampungan. Perkampungan asli suku Sasak didirikan di atas tanah yang mungkin dahulu menjadi milik masyarakat kampung.rumah yang didirikan di atas tanah gubug batu tidak dibatasi oleh pagar halaman. Pola perkampungan Sasak pada umumnya mengelompok padat. Desa atau kampung dari satu gubug kecil didirikan oleh satu leluhur.

B. Tinjauan mengenai pembentukan permukiman Sasak dengan simbolisme kekuasaan dan hubungan kekerabatan

a. Simbolisme kekuasaan pada permukiman Sasak

Konteks Islam Waktu Telu digunakan untuk membantu memahami sejarah terbentuknya permukiman masyarakat Suku Sasak yang masih berdasar atas tradisi-tradisi yang dipegang pada zaman lampau pada lokasi studi.

Pelaksanaan syareat pemeluk Islam Waktu Telu adalah terbatas pada pemimpin agama yang disebut kyai atau lebe atau guru. Menurut ajaran agama Islam Waktu Telu dalam prakteknya melarang orang yang bukan kyai mengerjakan ibadah. Pekerjaan ibadah adalah urusan kyai. Karena faham yang demikian itu, maka mereka menyerahkan urusan ibadah hanya kepada kyai. Menurut faham mereka kyailah yang mewakili mereka. Bagi mereka cukup melaksanakan upacara-upacara adat dan agama yang telah ditetapkan oleh kyai.

Dalam sejarahnya menurut konsep pembinaan agama Islam yang diletakkan oleh para mubaligh yang awal sekali dari abad ke enam belas sesungguhnya setiap orang kyai harus membina enam orang santri. Bila santri tersebut sudah luas ilmunya lalu dilantik menjadi kyai. Kyai baru juga selanjutnya harus membina enam orang santri pula dan seterusnya sampai akhirnya pembinaan agama Islam itu merata ke seluruh pelosok.

Tetapi karena keadaan politik, konsep yang demikian itu tidak berjalan malah praktis agama Islam di Lombok menjadi statis dan hanya dapat menyentuh beberapa orang laki-laki saja. Orang-orang wanita hampir tidak tersentuh dengan ajaran agama kecuali hanya diperolehnya dari pendengaran dan ceritera sajam sedangkan peranan wanita dalam pembinaan kepercayaan anak-anak sangat besar. Sebab dari ibulah untuk pertama kali

anak-anak mendengar tentang adanya makhluk gaib dan roh-roh di alam sekeliling mereka (Wacana et. al, 1985 : 13-15).

Dengan melihat sejarah terbentuknya permukiman tradisional masyarakat Sasak, bahwa dalam perilaku mereka sehari-hari dipengaruhi oleh peran individu-individu atau kelompok tertentu pada masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak telah mengenal adanya strata sosial. strata sosial akan memberi pengaruh dalam tatanan ruang mereka. Kracauer dalam Leach (1997 :59) menyatakan bahwa setiap strata sosial memiliki ruang yang sesuai dengan mereka. Perancangan ruang harus bersesuaian dengan perilaku dan kontak sosial yang sesuai dengam tempatnya (Crowhurst, 1993:39)

Pada permukiman Sasak yang ditata berdasarkan nilai yang dianut, khususnya pengaruh kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam senioritas pada keluarga dan tatanan ruang mereka, dapat dilhat bahwa dengan merujuk pada kepercayaan bahwa keselarasan hidup dapat dicapai dengan adanya kesinambungan antara manusia yang masih hidup denga leluhur yang telah meninggal. Pola ini menjadikan senior dalam keluarga memegang peranan penting, dan hal ini diwujudkan dalam tatanan ruang mereka (Sasongko, 2005:35)

b. Hubungan kekerabatan pada permukiman Sasak

1. Hubungan kekerabatan dengan tempat tinggal

Dalam Hirsan (2005:40) menyatakan bahwa hubungan kekerabatan pada masyarakat Suku Sasak merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi tempat tinggal. Masyarakat Sasak hidup secara kolektif dengan menempati suatu lahan, dan para penghuninya masih memiliki hubungan darah. Masyarakat pedesaan pada umumnya, seperti pada masyarakat Sasak memiliki kecenderungan untuk bertempat tinggal atau membangun rumah dekat dengan saudara-saudaranya. Adanya anggapan bahwa selain dapat memperat hubungan silaturahmi, juga berfungsi untuk lebih mempermudah komunikasi dan memudahkan tindakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keterkaitan ini akan membentuk suatu pola bermukim yang disebut istilah rumpun.

2. Kekerabatan dalam permukiman Sasak

Dalam Hirsan (2005:40), masyarakat Sasak hidup dan tinggal dengan membentuk *repoq-repoq.* Repoq ini terbentuk dari adanya permukiman yang ada. Rumpun ini pada awalnya terbentuk dengan adanya pagar tanaman hidup dan pohon-pohon tinggi yang diatur sedemikian rupanya hingga posisinya merapat satu dengan lainnya. Hal ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap ancaman serangan binatang buas, pencuri serta musuh. Dari keberadaan rumpun ini lambat laun akan membentuk kumpulan-kumpulan rumpun-

rumpun yang dinamakan *repoq*. Kemudian *repoq-repoq* ini akan membentuk suatu kelompok permukiman yang disebut dasan. Dari hadirnya kelompok bermukim ini, anggota penghuni di dalamnya adalah masih merupakan/memiliki hubungan kekerabatan satu dengan lainnya. Mereka hidup dan tinggal disana sejak orang tua-orang tua mereka dari generasi sebelumnya. Seiring pertambahan penghuninya, lahan-lahan daripada rumpun-rumpun ini semakin menyempit. Maka, beberapa orang yang telah mampu akan menepati/membeli lahan lain.

Hal ini menunjukkan antara rumpun yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat berkaitan dengan anggota penghuni yang satu dengan yang lainnya di dalamnya.

3. Orientasi karakter ruang permukiman Sasak.

Hirsan (2005 : 44), menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Sasak, orientasi karakter ruang yang digunakan didasatkan pada kebutuhan ruang dan didasarkan pada kondisi fungsional ruang tersebut dalam keseharian masyarakat, antara lain:

- Orientasi untuk penggunaan *private*

  Dalam setiap rumpun terdapat *Bale* atau rumah sebagai satu elemen utama yang ada di dalamnya. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, istirahat, berteduh dan belindung. Selain rumah, elemen lain yang bersifat pribadi adalah *berugaq* jika bangunan ini dimiliki oleh tiap-tiap rumah yang ada.

- Orientasi penggunaan semi public

  Wilayah semi *public* yang terdapat pada tiap rumpun adalah *berugaq* jika dibangun dan dimiliki oleh seluruh anggota.

- Orientasi penggunaan Public

  Penggunaan ruang yang dikategorikan ruang *public* adalah penggunaan lahan pekarangan secara bersama-sama oleh penghuni yang ada dalam rumpun tersebut.

c. Struktur ruang permukiman Sasak

1. Pengertian struktur ruang permukiman

Menurut Sasongko (2005:2), Struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, dan batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan.

2. Struktur ruang permukiman masyarakat Sasak

Menurut Sasongko (2005:4-8), bahwa struktur ruang permukiman masyarakat Sasak dapat dilihat berdasarkan klasifikasi berikut ini:

- Struktur ruang permukiman berdasarkan ritual kelahiran

Ritual kelahiran memiliki hubungan antar ruang dalam skala mikro dan makro. Skala ruang mikro ada di dalam rumpun keluarga dengan pusat peritiwa di halaman rumah, sedangkan saat memotong rambut di masjid yang dilaksanakan secara bersama memiliki ruang skala makro. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.

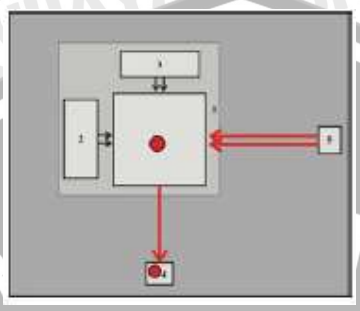

Gambar 2.2 Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan ritual kelahiran

Keterangan:
1. Halaman
2. Rumah Orang Tua
3. Rumah Anak
4. Masjid
5. Rumah Belian (Dukun)

- Struktur ruang permukiman berdasarkan ritual perkawinan

  Ritual perkawinan membentuk struktur permukiman dengan sifat yang bebas dalam pengertian inti peristiwa dan orientasinya tidak mengarai pada satu *cardinal* yang tetap akan tetapi lebih tergantung pada lokasi peristiwa pada saat ritual terjadi. Ritual ini diunjukkan pada Gambar 2.3.

Keluarga Perempuan Keluarga Laki-laki

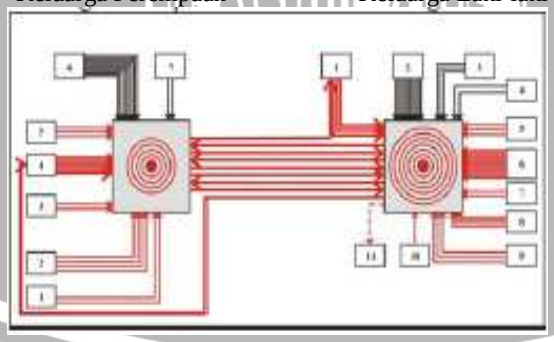

Gambar 2.3 Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan ritual perkawinan

Keterangan:
(Keluarga Perempuan)
1. Banjar
2. Pembayun
3. Belian
4. Keliang

5. Kiyai
6. Kerabat
7. Tetangga

(Keluarga Laku-laki)
1. kerabat 1 (Paman)
2. Kerabat lain
3. Teman
4. Tetangga
5. Kiyai
6. Keliang
7. Belian
8. Banjar
9. Pembayun
10. Gendang Beleq
11. Makam

- Struktur ruang permukiman berdasarkan ritual Maulid Nabi Muhammad

  Pelaksanaan maulid terdapat dua hal terkait dengan struktur ruang yang dapat dikaji. Pada saat persiapan Maulud terdapat sub-struktur yang bersifat temporal dan sebagai pusat rumah kepala kampung merupakan ruang bebas dalam arti rumah kepala kampung sebagai sebuag ruang bisa berganti pun dalam kampung itu. Sebaliknya pada saat pelaksanaan juga dapat terlihat adanya struktur ruang permukiman berdasarkan maulid dengan dua buah pusat yakni eumah kepala kampung dan bersifat tidak tetap, sedangpan pusat lainnya adalah langgar bersifat tetap. Struktur ruag yang dibentuk oleh ritual Maulid Nabi Muhammad SAW diunjukkan pada Gambar 2.4.

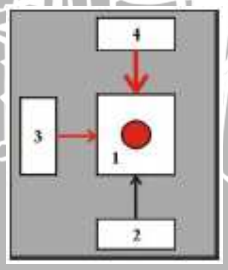

Gambar 2.4 Diagram struktur ruang permukiman berdasarkan Maulud Nabi

Keterangan:
1. Masjid
2. Masyarakat
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat

2.2.13 Tinjauan mengenai beberapa desa/permukiman Sasak yang pembentukannya berdasarkan aspek budaya

Berikut adalah beberapa permukiman Sasak di Pulau Lombok yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakatnya yang digunakan sebagai masukan untuk membantu mengungkapkan karakteristik permukiman di kawasan studi.

- Permukiman di Desa Segenter Kabupaten Lombok Barat

Permukiman Sasak khusunya di Desa Segenter terdapat tiga jenis bangunan, yaitu rumah *(bale mangina), beruga' (sekepat* dan *sekenam)* dan penyimpanan hasil bumi atau *lumbung. Lokasi* desa ini yang berada di daerah perbukitan dengan tanah yang datar memudahkan dalam perencanaan permukiman. Pola *grid* iron di desa ini memudahkan dalam pembagian rumah dan mendekatkan hubungan antara satu kepala keluarga dengan keluarga lain, memudahkan di dalam pengontrolan, kesamaan tingkat sosial penghuni dan memudahkan dalam pengaturan perletakan untuk setiap aktifitas.

Pembagian permukiman menjadi kelompok-kelompok dengan fungsi yang berbeda-beda, antara lain kelompok hunian dan kandang ternak dimaksudkan agar ternak tidak tersebar pada tiap pemiliknya dan tidak berkeliaran secara sembarangan di area rumah, sehingga hunian menjadi lebih sehat karena bebas dari bau kotoran ternak.

- Permukiman di Desa Puyung Kabupaten Lombok Tengah

Permukiman Sasak di Desa Puyung merupakan pengelompokan rumah keluarga dan setiap kelompok di kelilingi oleh pagar hidup. Pola ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya, yakni sistem matrilokal dalam pengertian seseorang yang telah menikah memiliki kebiasaan menetap di rumah orang tua, walaupun diijinkan untuk bertempat tinggal sendiri dan umumnya menetap dalam satu dusun dan berdekatan dengan keluarga induknya.

Elemen lain pembentuk permukiman, seperti fasilitas umum letaknya mengelompok di satu dusun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan dan pengaruh golongan bangsawan yang masih kuat dalam menentukan keputusan pembangunan.

Struktur ruang yang terbentuk karena pengelompokan permukiman yang terdistribusi dalam beberapa dasan mengalami kecenderungan perkembangan yang berbeda, yang pada awalnya disebabkan perbedaan status, kemudian berubah karena adanya pengaruh perkembangan pariwisata, sehingga terjadi pergeseran fungsi perumahan menjadi kawasan perdagangan (art shop). Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran makna struktur ruang dari psikis menjadi fungsional.

Berkaitan dengan struktur ruang dalam skala makro atau desa juga terjadi perubahan, terutama pada sepanjang jalan utama desa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, sehingga mengakibatkan kecenderungan pergeseran permukiman lebih masuk ke dalam yang nilai ekonominya lebih rendah. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan ruang telah bergeser dari pembentukan repoq ke arah akses jalan desa (Sasongko, 2002:121-123).

2.2.14 Citra kawasan

Citra kawasan pada penelitian ini untuk membantu memahami karakeristik lokasi studi terhadap lingkungannya.

Citra pada suatu kota, khususnya yang berkaitan dengan kawasan wisata budaya merupakan hal yang penting karena menurut Lynch *dalam* Zahd (1999:154) citra yang jelas akan memberikan banyak hal yang sangat penting, seperti kemampuan berorientasi dengan mudah dan cepat disertai perasaan nyaman karena merasa tidak tersesat, identitas yang kuat terhadap suatu tempat dan keselarasan hubungan dengan tempat-tempat yang lain. Elemen-elemen yang dipakai untuk mengungkapkan citra kota/kawasan meliputi (Lynch *dalam* Zahd, 1999:157-162):

- Jalur (*Path*)

  Jalur *(path)* terdiri dari rute-rute sirkulasi yang biasa digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, gang-gang utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran dan sebagainya. Jalur mempunyai identitas yang lebih baik kalau memiliki tujuan dan penampakan yang kuat serta belokan yang jelas.

  Pada kawasan wisata budaya berupa permukiman tradisional, jalan-jalannya memiliki pola yang khas sesuai dengan kondisi alam dan kepercayaan masyarakatnya. Permukiman tradisional yang memiliki pola jalan sesuai dengan kontur tanahnya yang berada di daerah perbukitan, antara lain adalah permukiman di Desa Segenter, Desa Loro-Ba, Desa Wonokitri dan Kampung Naga. Di Desa Buluttana Kabupaten Gowa, Desa Tamasaju dan Sanrobone Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan pola jalannya berbentuk linear yang selanjutnya mempengaruhi arah orientasi bangunan. Demikian pula dengan jalan pada permukiman di kawasan Kraton Buton.

  Di Desa Pantai Galesong bagian selatan, jalan-jalannya membentuk pola kisikisi linear karena adanya gang antar rumah.

- Tepian (*Edge*)

  Tepian *(edge)* adalah elemen linier yang tidak dipakai/dilihat sebagai *path* dan lebih berfungsi sebagai referensi. Tepian merupakan penghalang walaupun kadang-kadang

ada tempat untuk masuk. Tepian memiliki identitas yang lebih baik jika kontinuitas tampak jelas batasnya serta memiliki fungsi sebagai pembagi atau penyatu.

Pada permukiman-permukiman tradisional tepiannya ada yang berupa pagar hidup seperti di Desa Segenter, benteng seperti yang terdapat pada permukiman di dalam Kraton Buton; ada yang berupa sungai atau laut seperti pada permukiman tradisional di Desa Galesong bagian selatan dan Desa Tamasaju; serta ada pula yang tepiannya berupa lahan pertanian seperti di Desa Loro-Ba, Desa Wonokitri serta Kampung Naga.

- Kawasan (*District*)

  Kawasan (*district*) merupakan kawasan-kawasan kota dalam dua dimensi yang memiliki ciri khas yang mirip (bentuk, pola, wujudnya) dan khas pula dalam batasnya. Kawasan mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas oleh tampilannya dan dapat dilihat homogen serta memiliki fungsi dan posisi yang jelas.

  Desa-desa seperti Desa Loro-Ba, Desa Buluttana, Desa Tamasaju, Desa Sanrobone, kawasan Kraton Buton, Desa Pantai Galesong, Desa Adat Pengotan, Desa Wonokitri serta Kampung Naga merupakan kawasan permukiman tradisional dengan ciri khas yang dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya seperti kepercayaan dan nilai-nilai pandangan hidup. Sebagai sebuah wilayah administratif, desa-desa tersebut tentu saja memiliki batas-batas yang jelas dengan wilayah lain di sekitarnya.

- Simbol (*Node*)

  Simbol *(node)* merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis yang arah atau aktifitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktifitas lain. Simbol adalah salah satu tempat orang mempunyai perasaan `masuk' dan `keluar' dalam tempat yang sama. Simbol mempunyai identitas yang lebih baik jika memiliki bentuk yang jelas serta tampilannya berbeda dari lingkungan.

  Simbol pada permukiman tradisional umumnya sulit untuk dikenali karena hampir semua aktifitas di dalamnya bersifat homogen, sehingga hampir tidak terdapat lingkaran daerah strategis untuk pertemuan dan perubahan arah aktifitas.

- Tengeran (*Landmark*)

  Tengeran *(landmark)* adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kawasan, misalnya gunung atau bukit, gedung yang tinggi, menara dan sebagainya. Hal ini dapat membantu orang mengenali suatu kawasan, tengeran mempunyai identitas yang lebih baik jika bentuknya jelas dan unik dalam

lingkungannya dan ada sekuens dari beberapa tengeran serta ada perbedaan skala masing-masing.

Tengeran ini akan semakin jelas terlihat pada permukiman-permukiman tradisional yang berada di dataran yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, seperti permukiman di Desa Loro-Ba, Desa Pengotan Bali, Desa Wonokitri serta Kampung Naga. Hal ini dikarenakan dengan Ietaknya tersebut menjadikan permukiman memiliki latar belakang berupa gunung atau bukit. Tengeran pada permukiman tradisional semakin diperkuat dengan adanya bangunan tertentu seperti pura atau tempat pemujaan lainnya yang berada di daerah yang paling tinggi dari permukiman, dengan bentuk yang berbeda dari bangunan-bangunan lainnya.

2.2.15 *Linkage system*

Analisis *Linkage System* merupakan penelaahan hubungan secara makro dan menyeluruh dari suatu objek wisata sebagai suatu sistem. Sistem itu sendiri adalah kesatuan dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Sistem tersebut digambarkan ke dalam bagan yang memperlihatkan bagian-bagian dalam sistem yaitu masukan (*input*) dan keluaran (*output*) serta hubungan antara bagian-bagian dalam sistem itu (Wicaksono dan Sugiarto, 2001). Dari penelaahan tersebut kemudian dapat ditemukan berbagai permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada sistem yang menghubungkan antara objek wisata tersebut sehingga dapat ditentukan arahan pengembangannya.

Analisis *Linkage System* ini terdiri dari Analisis *Backward* Linkage dan *Forward Linkage*. Analisis *Backward Linkage* (kaitan kebelakang) merupakan kesatuan dari komponen internal yang memberikan input dalam objek wisata sebagai pemacu pertumbuhan dari dalam. Sedangkan Analisis *Forward* Linkage (kaitan kedepan) adalah kaitan antara komponen eksternal yang memanfaatkan output dari objek wisata.

Dalam pandangan ekonomi mikro maupun makro, pariwisata tidak akan lepas dari sektor perekonomian. Konsep mikronya, pariwisata menyentuh unit-unit spesifik ekonomi, seperti hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, perusahaan suvenir dan *handycraft*, serta *business unit* yang lain. Sementara itu, dalam ekonomi makro, pariwisata akan mempelajari gejala perekonomian dalam skala lebih besar, seperti agregat wisatawan, *spending power*, lama tinggal, dan efeknya terhadap sektor ekonomi yang lain (Wientor Rah Mada, 2002).

2.3 Penyusunan konsep dan strategi berdasarkan Analisis Proses Hierarki Analitik (*analitycal hierarchy process*/ahp) dan Analisis Swot

2.3.1 Analisis proses hirarki analitik (*Analitycal Hierarchy Process*/AHP)

Proses Hierarki Analitik (PHA) atau dalam Bahasa Inggris disebut Analytical Hierarchy Process (AHP), pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP pada dasarnya didisain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif. Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, 1993).

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain:

1 Dekomposisi, setelah mendefinisikan permasalahan/persoalan, maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu: memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya, sampai yang sekecil-kecilnya.

2 *Comparative Judgement,* prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks *Pairwise Comparison*.

3 *Synthesis of Priority,* dari setiap matriks *pairwise comparison* vektor *eigen* (ciri) – nya untuk mendapatkan prioritas lokal, karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki.

4 *Logical Consistency*, konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9. Nilai bobot 1 menggambarkan "sama penting", ini berarti bahwa nilai atribut yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut yang "penting absolut" dibandingkan dengan yang lainnya. Skala Saaty dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Skala Banding Secara Berpasangan (Saaty, 1993)

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama penting	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang Lain	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangaan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i	

Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis adalah (Saaty, 1993):

1 AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur.
2 AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
3 AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu system dan tidak memaksakan pemikiran linier.
4 AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

5 AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas.

6 AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.

7 AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

8 AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor system dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.

9 AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari penilaian yang berbeda-beda.

10 AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Di dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang *intangible* (yang tidak terukur) ke dalam aturan yang biasa, sehingga dapat dibandingkan. Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut (Saaty, 1993):

1 Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

2 Penyusunan struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah.

3 Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Teknik perbandingan berpasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan "*judgement*" atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai " *keyperson*". Mereka dapat terdiri atas: 1) pengambil keputusan; 2) para pakar; 3) orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi.

4 Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai berikut:

A = (aij) =

	C1	C2	….	C_n
C1	1	a_{12}	….	A_{1n}
C2	$1/a_{12}$	1	….	A_{2n}
….	-	-	….	-
Cn	$1/a_{1n}$	$1/a_{2n}$	….	1

Dalam hal ini C1, C2, ... Cn adalah set elemen pada satu tingkat dalam hierarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk matriks n x n. Nilai aij merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan Ci terhadap Cj.

5 Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat.

6 Pengolahan horisontal, yaitu : a) Perkalian baris; b) Perhitungan vector prioritas atau vektor ciri (eigen vektor); c) Perhitungan akar ciri (eigen value) maksimum, dan d) Perhitungan rasio inkonsistensi. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden

7 Pengolahan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama.

8 Revisi Pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi (>0,1). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.

2.3.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pariwisata, yaitu untuk melihat Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (kesempatan) dan Threathen (ancaman), dan menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi pelestarian yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam arahan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Potensi *(Strength)*: kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh, sehingga dapat bertahan di pasaran, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri;
- Masalah *(Weakness)*: segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau objek itu sendiri;
- Peluang *(Opportunities*): kesempatan yang berasal dari luar wilayah studi. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan atau kondisi ekonomi secara global; dan
- Ancaman (*Threathen*): merupakan hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau objek

A. Matriks SWOT

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi dasar pemecahan masalah yang dapat diterapkan secara kualitatif. Adapun cara yang dilakukan adalah :

1 SO : strategi/alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O)

2 ST : strategi/alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman (T) dan berusaha menjadikan maksimal menjadi peluang (O)

3 WO : strategi/alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O)

4 WT : strategi/alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman (T).

Tabel 2.2 Matriks SWOT

		Internal Factor	
		Strength	**Weakness**
Exsternal Factor	**Opportunity**	**SO**	**WO**
	Threaten	**ST**	**WT**

Sumber : Modul Studio Perencanaan Desa, 2001:VI-4

B. Kuadran SWOT

Keempat faktor tersebut masing-masing dianalisis yang ditinjau dari beberapa variabel yang akan mempengaruhi pengembangan. Kemudian dilakukan penilaian untuk mengetahui posisi objek pada kuadran SWOT. Dari penilaian tersebut diketahui koordinat pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga diketahui posisinya sebagai berikut :

- Kwadran I *(Growth)*, adalah kuadran pertumbuhan pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu Ruang A dengan *Rapid Growth Strategy* yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu singkat dan Ruang B dengan *Stable Growth Strategy* yaitu strategi pertumbuhan stabil pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi

- Kwadran II (*Stability*), adalah kuadran pertumbuhan pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy dan pengelola objek melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif serta Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy dan pengelolaan objek adalah dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting
- Kwadran III (*Survival*), adalah kuadran pertumbuhan pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu Ruang E dengan Turn Around Strategy, yaitu strategi bertahan dengan cara tambal sulam untuk operasional objek dan Ruang F dengan Guirelle Strategy, yaitu strategi gerilya, sambil operasional dilakukan, diadakan pembangunan atau usaha pemecahan masalah dan ancaman
- Kwadran IV (*Diversification*), adalah kuadran pertumbuhan pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu Ruang G dengan Concentric Strategy yaitu strategi pengembangan objek dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak dan Ruang H dengan Conglomerate Strategy, yaitu strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor itu sendiri.

Keempat kuadran SWOT secara lebih lanju ditunjukkan pada Gambar 2.5.

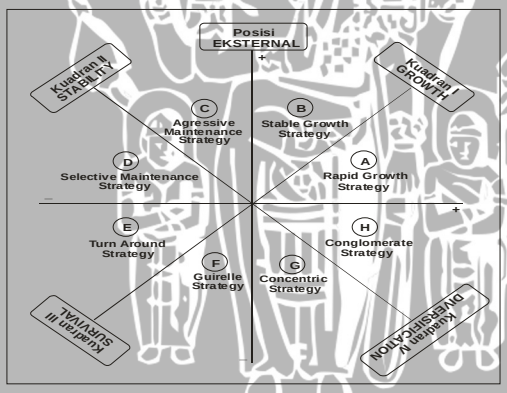

Gambar 2.5 Kuadran SWOT

2.4 Tinjauan Pelestarian

Pengertian dan istilah pelestarian yang dikemukakan oleh para perencanaan kota bermacam-macam. Beberapa pengertian pelestarian sebagai berikut:

Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa konservasi merupakan upaya melestarikan dan melindungi, sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya. • Konsep pelestarian menurut Yuwono (1995:3) adalah suatu kerangka tindakan, yang dalam pengertian sempit berarti mengamankan, melindungi, memelihara dan memanfaatkan.

Dalam pengertian yang lebih luas, pelestarian berarti suatu tindakan pengelolaan atau manajemen suatu satuan wilayah perkotaan atau perdesaan sebagai suatu satuan organisme kehidupan yang tumbuh dan berkembang dengan dua tujuan orientasi, yaitu (1) Tindakan pengelolaan sumber budaya atas lingkungan hidup binaan yang dilaksanakan melalui proses politik; dan (2) Tindakan untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan bermacam-macam konsep pelestarian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelestarian dalam studi ini adalah seluruh upaya/tindakan untuk memelihara, mengamankan dan melindungi sumber daya yang ada pada suatu tempat, baik fisik maupun budaya untuk kemudian dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan.

Pelestarian kawasan wisata budaya tidak hanya menyangkut kawasan yang mengandung nilai atau benda-benda bersejarah saja, tetapi juga bagian-bagiannya yag mempunyai mempunyai keterkaitan dengan nilai atau benda-benda bersejarah tersebut. Adapun tindakan pelestarian kawasan wisata budaya adalah tindakan mengamankan, mengawetkan juga mengelola kawasan tersebut beserta lingkungannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata.

2.4.1 Lingkup pelestarian

Menurut Sidharta & Budihardjo (1989:9), mula-mula konsep konservasi sebagai payung pelestarian terbatas pada pelestarian atau pengawetan monumen bersejarah (lazim disebut preservasi), yaitu dengan mengembalikan, mengawetkan atau `membekukan' monumen tersebut seperti keadaan semula di masa lampau. Dalam *Monumenten Ordonantie* Stb1.23 8/1931 (MO 1931) pasal 1 disebutkan bahwa :

"Yang dianggap sehagai monumen dalam peraturan ini:

a. benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah dan kesenian.

b. benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut paleoan-thropologi.

c. situs yang mempunyi petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada ad. a dan ad. b.

Konsep konservasi kemudian berkembang, tidak hanya mencakup monumen, bangunan atau benda arkeologis saja melainkan juga lingkungan, taman dan bahkan kota bersejarah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut ini.

2.4.2 Permasalahan dalam upaya-upaya pelestarian

Dalam upaya penjabaran strategi pembangunan berwawasan identitas, salah satu aspek yang sering terlupakan adalah pelestarian bangunan kuno/bersejarah, yang banyak terdapat di segenap pelosok daerah. Perhatian terlalu banyak dicurahkan pada bangunan baru, yang memang lebih mengesankan sebagai cerminan modernitas. Padahal dengan hilangnya bangunan kuno tersebut, lenyap pulalah bagian dari sejarah suatu tempat yang sebenarnva telah menciptakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya (Sidharta & Budihardjo dalam Krisna, 2005).

Sidartha & Budihardjo dalam Krisna (2005) juga mengungkapkan bahwa sebagaimana diketahui, kesinambungan masa lampau - masa kini - masa depan yang mengejewantah dalam karya-kanya arsitektur setempat merupakan faktor kunci dalam penciptaan rasa harga diri. percaya diri dan jati diri atau identitas karena keberadaan bangunan kuno bersejarah tersebut mencerminkan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya. Oleh karena itu pelestarian bangunan kuno/bersejarah perlu untuk dilestarikan. Namun pada kenyataannya, kegiatan pelestarian sering mengalami benturan dengan kepentingan pembangunan, sehingga pelestarian dianggap sebagai penghalang pembangunan yang mengakibatkan timbulnya pertentangan-pertentangan dalam pelestarian.

Permasalahan yang berkaitan dengan pertentangan perlu atau tidaknya pelestarian dapat digolongkan sebagai permasalahan makro pelestarian. Permasalahan makro yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pelestarian bangunan dapat dibedakan atas aspek ekonomi, sosial dan fisik (lihat Tabel 2.3)

Tabel 2.3 Permasalahan Makro Pelestarian

Aspek	Permasalahan
Ekonomi	• Pelestarian dianggap menghambat mekanisme ekonomi pasar bebas sejak diadakan sistem legalisasi. • Desain bangunan yang dilestarikan dianggap tidak efisien dan penggunaannya kurang ekonomis menjadi penghalang pembangunan gedung dan fasilitas yang lebih baik.
Sosial	• Dipandang sebagai usaha pencegahan atas perbaikan lingkungan `kelompok lemah' karena adanya halangan untuk membangun gedung clan fasilitas yang baru, pelestarian dianggap menyebabkan rakyat biasa harus melanjutkan tinggal dan bekerja dalam kondisi yang kurang. • Hakikat pembangunan yang berhasil membawa pengubahan pada pola pikir dan pandangan masyarakat sehingga dalam mengambil keputusan lebih menitikberatkan pada kepentingan efisiensi yang bertujuan menda atkan keuntun an ekonomis yang sebesar-besamya.
Fisik	• Usaha yang dilakukan para perencana maupun kelompok konservasi dalam mempertahankan bentuk fisik pada kawasan dianggap mengabaikan permintaan terhadap fasilitas perbelanjaan karena fasilitas perbelanjaan memerlukan area horizontal yang luas untuk ruang jual, ruang pamer clan parkir, sedangkan kawasan yang bernilai sejarah cenderung menyediakan unit-unit untuk pedagang eceran yang membutuhkan ruang sempit dalam bangunan vertikal.

Sumber : Gufron (1994:20-21); Yuwono dalam Krisna(2005)

Selain permasalahan pelestarian yang bersifat makro, di dalam penerapannya pelestarian juga menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian yang berkaitan dengan sistem pengelolaan warisan budaya, dengan perangkat terkait sebagai berikut : aspek legal, sistem administrasi, piranti perencanaan, kuantitas dan kualitas tenaga pengelola, serta pendanaan (Catanese & Snyder, 1992:429). Permasalahan mikro yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pelestarian dapat dilihat pada Tabe1 2.4.

Tabel 2.4 Permasalahan Mikro Pelestarian

Aspek	Permasalahan
Hukum	• Hak-hak dan tanggung jawab apa yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam pelestarian bangunan ? • Seberapa jauhkah seharusnya pembatasan-pembatasan atas pengubahan dalam bangunan-bangunan yang dilestarikan ? • Dapatkah pemerintah memaksa pemilik untuk melestarikan dan memelihara bangunan yang dilestarikan ? • Hak-hak apa yang dimiliki oleh pemilik dan penyewa dalam kaitannya dengan tanah ? • Siapakah yang berhak memperoleh keuntungan dan kerugiannya ?
Pendanaan	• Siapakah yang membiayai konservasi dan siapa yang memperoleh keuntungannya ?
Pengelolaan	' Siapakah yang berhak dan harus memutuskan apa yang dilestarikan, untuk berapa lama dan sejauh mana ?

Sumber : Catanese & Snyder (1992:429)

Yuwono dalam Krisna(2005) menambahkan bahwa pelestarian budaya sering tidak berjalan mulus karena berkaitan dengan pembangunan itu sendiri. Perubahan sebagai konsekuensi pembangunan, tidak hanya dibatasi oleh laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumiah penduduk, kelompok etnis dan tingkat pendidikan, tetapi juga perubahan nilai-nilai dan sikap. Indikasi tersebut tergambar dalam sifat dan struktur masyarakat yang semakin majemuk, heterogen dan kompleks, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini mengakibatkan sikap dan apresiasi terhadap warisan budaya menjadi

berbeda-beda, sehingga sering muncul kerancuan dalam penilaian tentang budaya. Di samping itu, pembangunan saat ini sering diidentikkan dengan modernisasi yang dianggap sebagai suatu proses rasional. Modernisasi inilah yang mempengaruhi sikap masyarakat dan selanjutnya mempengaruhi tindakan pengambilan keputusan dengan lebih menitikberatkan pembangunan untuk kepentingan ekonomi.

Permasalahan pelestarian ini tidak hanya dialami oleh kawasan-kawasan bersejarah yang ada di kota, melainkan juga kawasan bersejarah yang ada di pedesaaan, yang selama ini dikenal memegang teguh hukum adat sebagai dasar aturan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Bali. Di Desa ini, permasalahan pelestariannya lebih kepada perubahan orientasi masyarakat terhadap arsitektur yang merupakan bagian dari daya tarik desa tersebut, yakni terjadinya penambahan fungsi pada salah satu *compound* rumah tradisional *(bale buga),* dari fungsi utamanya sebagai tempat melaksanakan upacara untuk para dewa dan leluhur kemudian fungsinya bertambah menjadi artshop. Hal ini mendapat perhatian serius dari pemuka-pemuka masyarakat terutama para sesepuh desa karena perubahan lingkungan binaan di sekitar desa adat dianggap dapat merusak potensi desa dalam menarik wsatawan. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain dengan menetapkan suatu aturan adat tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan dalam pendirian dan pemanfaatan bangunan tradisional untuk kepentingan pariwisata.

2.4.3 Arahan kegiatan pelestarian

A. Bentuk-bentuk pelestarian

Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan jaman, kegiatan preservasi juga berkembang sehingga dapat menampung berbagai kebutuhan kota/kawasan dengan tetap mempertahankan nilai dan bangunan bersejarahnya, bahkan budaya yang ada. Berbagai macam jenis pelestarian menurut Catanese & Snyder (1992) yang dirangkum dalam studi yang dilakukan oleh Nurmala (2003); Siregar (1998); dan Setiawan (1998) meliputi :

- Preservasi adalah suatu upaya untuk melindungi/menjaga bangunan, monumen dan lingkungan dari kerusakan serta mencegah proses kerusakan yang terjadi.
- Konservasi adalah upaya mempreservasikan bangunan agar penggunaannya lebih efisien dan mengarahkan perkembangannya di masa depan.
- Restorasi adalah pengembalian kondisi fisik bangunan seperti sedia kala dengan membuang elemen-elemen tamhahan dan memasang kembali bagian-bagian orisinil yang telah rusak atau menurun, sehingga dapat berfungsi kembali seperti sedia kala.

- Rehabilitasi adalah pengembalian kondisi bangunan yang telah rusak atau menurun, sehingga dapat berfungsi kembali seperti sedia kala.
- Renovasi adalah tindakan merubah interior bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan sehubungan dengan adaptasi bangunan tersebut terhadap bangunan baru atau konsep-konsep modern.
- Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan atau membangun kembali semirip mungkin dengan penampilan orisinil yang diketahui.
- Adaptasi adalah segala upaya dalam mengubah suatu tempat agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.
- Replikasi adalah pembangunan bangunan baru yang meniru unsur-unsur atau bentuk-bentuk bangunan lama yang sebelumnya ada tetapi sudah musnah.
- Substitusi (pengalihan fungsi bangunan) adalah upaya mengganti fungsi bangunan bersejarah dengan status baru untuk meningkatkan kembali nilai dan fungsinya sesuai dengan kepentingan dan jamannya.
- Benefisasi adalah upaya meningkatkan manfaat suatu bangunan bersejarah yang semula tidak menarik menjadi berfungsi untuk kepentingan hidup manusia baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pariwisata dan rekreasi.
- Perlindungan wajah bangunan adalah metoda yang dilakukan bila ciri utama dari bangunan lama yang perlu dilestarikan terletak pada wajah bangunannya. Perombakan umumnya dilakukan pada bagian dalam atau belakang bangunan, sedangkan wajah bangunan tetap dipertahankan.
- Perlindungan garis cakrawala atau ketinggian bangunan adalah upaya yang dilakukan antara lain dengan membatasi ketinggian bangunan baru yang akan dibangun di sekitar ciri lingkungan bangunan atau kawasan peninggalan sejarah yang sejak lama terbentuk di kota tersebut.
- Perlindungan objek atau potongan adalah upaya yang dilakukan terhadap ciri utama dari bangunan yang akan dirombak atau dihancurkan, sehingga perombakan yang dilakukan masih memperlihatkan bahwa pernah ada suatu bangunan atau kawasan lama tersebut.
- Demolisi adalah upaya penghancuran atau perombakan suatu lingkungan binaan yang sudah rusak atau membahayakan.

B. Kriteria pelestarian

Menetapkan suatu objek pelestarian harus ada dasar kriteria pemilihannya terlebih dahulu, tidak harus seluruh kriteria yang ada ditetapkan secara sekaligus. Namun apabila sesuatu atau beberapa kriteria dianggap perlu untuk diterapkan, maka proses dan prosedur penilaian harus dirumuskan secara seksama. Kriteria yang digunakan dalam menentukan objek konservasi yang perlu dilestarikan seperti dirinci Catenese (1979), adalah sebagai berikut.

a. Peranan Sejarah

Lingkungan kota atau bangunan yang memiliki nilai sejarah, suatu peristiwa yang mencatat peran ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah, dan babak perkembangan suatu kota.

b. Keluarbiasaan

Suatu objek konservasi yang memiliki bentuk menonjol, tinggi dan besar. Keistimewaannya memberi tanda atau ciri kawasan tertentu.

c. Memperkuat Citra Kawasan

Kehadiran suatu objek atau karya akan mempengaruhi kawasan-kawasan sekitarnya dan bermakna untuk meningkatkan mutu dan citra lingkungannya.

d. Estetika

Estetika berkaitan dengan nilai arsitektural, meliputi bentuk, gaya, struktur tata kota, mewakili prestasi khusus atau gaya sejarah tertentu. Dalam hal ini, sulit diputuskan suatu rumusan pertimbangan untuk menetapkan apakah suatu bangunan atau kawasan patut dikonservasikan.

e. Keaslian bangunan

Keaslian fisik bangunan akan mempengaruhi tindakan pelestarian yang akan dilakukan. Parameter yang digunakan berhubungan dengan struktur atau material bangunan.

f. Keterawatan bangunan

Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur akan lebih memfokuskan pada tampilan wajah bangunan maupun selubungnya.

Menurut "Historic Preservation Element Guidelines", Office of Planning and Research, State of California, September 1976.

Kriteria dapat berupa pertanyaan-pertenyaan:

1. Apakah objek tersebut ada hubungannya dengan orang, kelompok, atau peristiwa penting?

2. Apakah objek merupakan contoh yang jarang dari gaya arsitektur atau teknik konstruksi tertentu?
3. Apakah objek itu mengingatkan kita pada tahap awal atau perkembangan atau fungsi
   penting dalam lingkungan?
4. Apakah ada arkeologi atan paleontologi yang potensial di sini?
5. Apakah bentuk-bentuk *landscape, fixture*, atau elemen desain merupakan komponen penting dari kualitas pandangan lingkungan, wilayah, jalan ataupun tanah pribadi?
6. Apakah objek merupakan titik pandangan yang penting bagi masyarakat di situ?
   Apakah objek merupakan.bagian yang tidak terpisahkan dari *streetscape*; yang jika dihilangkan akan segera mempengaruhi hubungan ruang dan desain yang sudah dirasakan secara tradisional dari wilayah yang berdekatan atau yang lebih luas lagi

Batasan dan kriteria suatu objek yang akan dilestarikan juga akan mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992; yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya yang khas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Menurut Fitch (1982:39) terdapat tiga parameter preservasi historis, sebagai berikut:

- *Skala*, preservasi yang dilakukan dilihat dan luas wilayah preservasinya. Dari yang sangat luas (misal mencakup satu pulau), atau hanya bagian kecil dari suatu daerah.
- *Tipe dari artifak*, dengan mempertimbangkan keberhargaan preservasi, baik dan struktur tradisional, sampai monumen-monumen pencakar langit.
- *Ukuran dari artifak*, dalam hal ini dilihat dari besar kecilnya artifak peninggalan sejarah.

Biasanya untuk melestarikan bangunan atau kawasan bersejarah digunakan lebih dari satu bentuk pelestarian seperti yang tercantum pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Cara Pelestarian Berdasarkan Faktor Penyebabnya

Faktor Penyebab	Cara Pelestarian											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengubahan fungsi/	x	x	x	x								

Lanjutan Tabel 2.5 Cara Pelesarian Berdasarkan Faktor Penyebabnya

Faktor Penyebab	Cara Pelestarian											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penetrasi Tidak sesuai dengan Perkembangan kota				x	x	x	x					
Bahan bangunan tidak tahan lama								x	x	x		
Kurang perawatan/ Proses menua					x			x	x		x	
Pelebaran jalan						x				x		x
Perkembangan bangunan	x			x				x				
Perubahan selera		x							x			
Ketidaksesuaian desain		x							x			

Sumber : Gufron, 1994:115

Keterangan :

l. Perlindungan wajah bangunan
2. Adaptasi/penyesuaian
3. Renovasi/perombakan
4. Garis cakrawala
5. Substitusi/revitalisasi
6. Rekonstruksi/relokasi
7. Pemotongan
8. Restorasi/pemugaran
9. Rehabilitasi/perbaikan
10. Replikasilpeniruan
11. Benefisasi
12. Pengurangan atau pengalihan arus lalu lintas

Pelaksanaan pelestarian di Indonesia sendiri, khususnya untuk kawasan budaya yang masih memegang kuat norma-norma serta aturan adat setempat, upaya pelestariannya biasanya di dasarkan pada hukum-hukum adat yang telah menjadi kesepakatan masyarakatnya, seperti yang terjadi di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Di desa ini upaya pelestarian dalam bentuk konservasi telah diatur dalam sebuah keputusan desa adat yang sebelumnya telah dirumuskan oleh sebuah panitia khusus. Rumusan dalam keputusan tersebut antara lain berisi ketentuan mengenai lokasi usaha dagang yang bergerak dalam bidang kepariwisataan maupun yang lainnya agar tidak merusak pola menetap yang sudah ada, yang juga mencakup arsitektur bangunan tradisional setempat. Walaupun ketentuan tersebut sudah mecakup seluruh permasalahan krusial yang mendasar, namun belum menjamin untuk ditaati oleh masyarakat Tenganan karena adanya beberapa kelemahan dari ketetapan tersebut, seperti tentang penerapan sanksi belum tegas diatur dalam rumusan tentang siapa yang berhak mengawasi dan bentuk-bentuk sanksi yang harus dikenakan kepada pelanggar (Sulistyawati, 1998:31-32).

Di luar negeri, upaya pelestarian yang patut dicontoh adalah revitalisasi pusat kota Nagahama, Jepang. Upaya revitalisasi tersebut dilakukan dengan menjadikan kota tersebut sebagai kota industri baru dengan industri kecil berupa kerajinan gelas sebagai salah satu

komoditi andalannya, yang didukung oleh wajah kota yang khas, yang dibentuk oleh peninggalan lama, seperti machiya (rumah tradisional) dan lumbung-lumbung beras yang kosong (Adhisakti, 2004).

Kebijakan revitalisasi tersebut kemudian didukung dengan program perbaikan fisik, infrastruktur dan keindahan kota, sedangkan dalam pengelolaannya pemerintah kota bekerja sama dengan masyarakat dan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak swasta. Dengan upaya ini masyarakat yang tinggal di luar kota Nagahama dapat memenuhi kebutufiannya akan berbagai kerajinan gelas, dan masyarakat lokal dapat memenuhi kebutuhan modern di lingkungan trdisional yang sehat serta pusaka kota bersejarah secara berkelanjutan terpelihara dan lestari dengan baik.

2.4.4 Tinjauan perencanaan kawasan pelestarian

A. Perencanaan kawasan dari segi aspek fisik dan non fisik dengan berdasarkan arahan pelestarian

Setyawan (2005:45) dalam arahan perencanaan suatu kawasan di Kawasan Masjid Menara Kudus menetapkan suatu arahan dengan menetapkan tujuan perencanaannya yaitu meningkatkan citra kawasan.

Menurut Setyawan (2005:45) perencanaan suatu kawasan dapat menggunakan kajian-kajian pada aspek-aspek berikut ini, yaitu sebagai berikut:

1. Usulan penataan fisik dan non fisik;
2. usaha *adaptive re-use* bangunan kuno;
3. memperkuat identitas lingkungan sebagai pusat orientasi kegiatan ritual agama;
4. *legal protection*;
5. peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat; dan
6. penyediaan fasilitas bersama (*public domain*).

Menurut Krisna (2005:136), perencanaan suatu kawasan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kawasan. Adapun pembagian suatu arahan perencanaan fisik dan non fisik di suatu kawasan wisata budaya dengan kategori permukiman tradisional Masayarakat Sasak di daerah Lombok adalah sebagai berikut:

1. Arahan aspek fisik, dengan menggunakan kajian terhadap (Setyawan, 2005:136-138):
   a. Pola permukiman;
   b. Orientasi ruang;
   c. Pendirian bangunan baru;

d. Pembangunan *berugaq*;
e. Penggunaan bahan-bahan yang berasal dari alam untuk material rumah; dan
f. Tata ruang dalam.

2. Arahan aspek non fisik, yang bertujuan dalam meningkatkan nilai budaya dan menjadikannya sebagai akar kebudayaan Sasak , menggunakan dasar-dasar sebagai berikut (Setyawan, 2005:139):
   a. Upaya pelestarian non fisik melibatkan partisipasi etnik dalam masyarakat yang khas, seniman, budayawan dan lembaga-lembaga budaya Sasak untuk berinteraksi dalam suatu wadah pengelola budaya;
   b. Harus mempertimbangkan keterkaitan dengan kawasan wisata budaya lainnya dengan kawasan wisata sekitrnya melalui peningkatan wisata budaya dan festival budaya

   Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   - Pengkoordinasian kegiatan ritual budaya dengan kegiatan wisata lainnya yang dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukkan budaya;
   - Pemeliharaan dan pengembangan kegiatan budaya; dan
   - Pembentukan wadah pelestarian budaya Sasak yang menampung aspirasi seniman dan budayawan yang ada di Dusun Sade dan dusun-dusun sekitarnya.

B. Prinsip -prinsip Landasan Kegiatan Perencanaan dan Perancangan untuk Mencapai Tingkat Kesesuaian Yang signifikan antara Perilaku manusia, sosio-kultural (budaya) dan Lingkungan Bermukim (Rapoport, 1979a)

1. Perlunya penetapan karakteristik, gaya hidup, tata laku, preferensi lingkungan, citra, taksonomi ruang dan waktu, dan seterusnya dari suatu kelompok masyarakat
2. Perlu dipahami kebutuhan komunikasi dan privasi, mekanisme dan pertahanan yang digunakan.
3. Perlu pemahaman atas pengekspresian simbol status sosial pada permukiman dan artefak lainnya, demikian pula dengan cara-cara pokok yang digunakan untuk membentuk identitas sosial.
4. Perlu diketahui corak kebutuhan sistem aktivitas dan aspek latennya, serta distribusinya dala ruang dan waktu.

5. Perlu ditelusuri organisasi, hubungan dan jaringan sosial serta hubungan ketiganya dengan organisasi lingkungan, serta dengan pola-pola pergerakan, dan jugu dengan tingkat wadah dan interaksi

C. Prinsip-prinsip landasan pengelolaan objek wisata dengan signifkansi budaya berdasarkan piagam internasional objek wisata dengan signifikansi budaya

a. Pengelolaan tempat/objek wisata budaya

Warisan/Pusaka adalah suatu konsep luas dan meliputi yang alami seperti halnya lingkungan yang budaya. Warisan/pusaka tersebut meliputi pemandangan, tempat bersejarah, lokasi dan membangun lingkungan, seperti halnya biodiversas, koleksi, masa lampau dan berkelanjutan dalam hal penerapan budayanya, pengetahuan dan pengalaman. Warisan/Pusaka tertentu dan memori kolektif dari tiap tempat atau masyarakat adalah tidak tergantikan dan suatu pondasi penting untuk pengembangan, kedua-duanya sekarang dan ke masa depan.

Suatu sasaran pokok untuk mengelola warisan/pusaka adalah adanya keselarasan arti dan persepsi serta kebutuhan untuk konservasinya ke masyarakat lokal dan pengunjung.

b. Sasaran hasil Piagam

Sasaran hasil Piagam Internasional Objek Wisata dengan Signifikansi Budaya adalah:

- Pengupayaan konservasi dan pemahamannya terhadap objek wisata budaya, yang dapat diakses oleh masyarakat lokal dan wisatawan; dan
- Untuk mendorong itu merumuskan rencana dan kebijakan untuk kembangkan strategi dan tujuan yang terukur dan terperinci berkenaan dengan penafsiran dan presentasi warisan/pusaka dalam menempatkan aktivitas budaya, dalam konteks konservasi dan pemeliharaan mereka.

D. Partisipasi masyarakat di kawasan pelestarian dalam konteks perencanaan kawasan

a. Partisipasi masyarakat

1. Pengertian partisipasi / peran serta masyarakat

Peran serta dalam hal ini diterjemahkan dari asal kata *participation,* yang merupakan keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat. Ramos (Yeung & Mc Gee, 1986) menyebutkan bahwa secara umum peran serta seseorang, sekelompok orang atau masyarakat mengandung maksud penyerahan sebagian peran serta

dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari satu pihak ke pihak lain. Oleh karena itu suatu peran serta memerlukan kesediaan kedua belah pihak dalam satu hubungan yang saling menguntungkan.

Pendekatan partisipasi masyarakat memiliki banyak sekali definisi. Carter, 1996 memberikan definisi sebagai : "*A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area*" atau "Suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut". Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya. Dengan demikian pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai padanya.(Zamani dan Darmawan, 2000 :12).

Setidaknya empat keuntungan yang didapatkan dalam pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat : (1) masyarakat ikut mengontrol pembangunan di sekitar mereka, (2) dukungan yang luas dari masyarakat dalam pembangunan, (3) ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pemanfaatan, (4) pembangunan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitarnya. (Gunarto Latama,dkk, 2002 :17)

Banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan. Peran serta masyarakat dalam sistem perencanaan dihadapkan pada berbagai persoalan, baik pada level negara bagian maupun lokal. Hambatan atau kendala dalam mendorong peran serta masyarakat dalam penataan ruang yaitu: (Eddy Ihut Siahaan, 2002 :5)

1. Partisipasi dalam proses perencanaan lokal umumnya dimulai sangat terlambat, yaitu setelah rencana (*the real planning directions*) telah selesai disusun, sehingga masyarakat akhirnya hanya mempertanyakan hal-hal bersifat detail.
2. Partisipasi komunitas yang sungguh-sungguh sangat sedikit apalagi mengenai isu-isu besar seperti pertumbuhan dan pembangunan kota.

3. Ketika partisipasi tersebut benar-benar diinginkan, terlalu sedikit masyarakat yang terorganisasi atau yang terstruktur secara mapan yang efektif mengajukan masukan dan komunitas.
4. Pemerintah lokal (kota), jika memang ingin cenderung menghindari peran serta masyarakat, dengan membuat keputusan-keputusan secara rahasia atau dengan menyediakan waktu yang tidak memadai untuk *public discussion.*
5. Secara umum, komunitas tidak memiliki sumberdaya yang baik dalam hal waktu, keahlian atau ruang untuk membuat aspirasinya didengar secara efektif.

Ternyata masih banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).

b. Partispasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian

Partisipasi masyarakat menurut Wibisana *dalam* Irawati (1996:22) diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dimulai dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, sehingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Partisipasi tidak langsung berupa bantuan keuangan, pemikiran dan materi yang dibutuhkan. Menurut Wilson dalam Irawati (1996:22), keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pendapat dalam public *hearing* yang diadakan untuk setiap rencana peremajaan suatu kawasan.

Widayati (2000:93-95) menambahkan bahwa peran aktif masyarakat dalam suatu upaya pelestarian merupakan hal yang penting karena hanya masyarakatlah yang mengetahui permasalahan serta apa saja yang dibutuhkan demi kesinambungan kawasan yang dilestarikan, yang dapat membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun sebelum menuju ke arah partisipasi tersebut, dibutuhkan kesamaan persepsi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian.

Menurut Nur'aini (2001), penyamaan persepsi masyarakat yang tinggal pada suatu kawasan pelestarian merupakan haI yang penting karena persepsi tersebut merupakan salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam kegiatan pelestarian. Adapun kesamaan persepsi yang dimaksudkan dalam hal ini mencakup kesamaan terhadap keberadaan dan fungsi kawasan, pentingnya aspek sejarah yang

dikandung, pentingnya kegiatan pelestarian, serta perlunya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian.

Persepsi sendiri diartikan sebagai salah satu faktor psikologi yang sangat erat hubungannya dengan keberhasilan manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dovidoff *dalam* Robbins (1991) memandang persepsi sebagai satu proses yang antara satu degan yang lain sifatnya berbeda *(individualistic)* dari apa yang diperkirakan orang, sehingga apa yang dipersepsikan oleh orang bias jadi secara substansial berbeda dengan kenyataan objek tersebut karena individu-individu melihat objek yang semu ta.pi memandangnya berbeda

2.5 Studi-Studi yang Pernah Dilakukan

Studi yang akan diuraikan berikut merupakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan pada kawasan permukiman Sasak maupun tempat/kawasan lainnya yang masih berkaitan dengan studi yang akan dilakukan.

1. Sri Agustina Mahayani (1995)

Studi yang dilakukan oleh Mahayani (1995) yang berjudul "Bentuk-bentuk Arsitektur dan Konsep Religi Pendukungnya di Permukiman Suku Sasak Dusun Sade, Lombok, NTB", bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk tata ruang permukiman, bangunan dan tata ruang dalam rumah serta konsep-konsep yang melatarbelakanginya. Dengan menggunakan metode etnoarkeologi, yaitu pendekatan pada aspek arkeologi untuk mengetahui pengaruh kepercayaan yang berkembang dalam masyarakatnya terhadap bentuk yang dihasilkan, maka diperoleh hasil bahwa dalam pemilihan lokasi permukiman di daerah ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor kepercayaan terhadap kosmos, faktor keamanan dan faktor kesuburan tanah. Bahan dan bentuk bangunan yang ada terkait erat degan kepercayaan, yaitu berkah yang diharapkan bagi penghuninya. Pembagian tata ruang dalam rumah yang ditandai dengan perbedaan ketinggian lantai menunjukkan tingkat kesakralan, semakin tinggi lantai maka tingkat kesakralannya semakin tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Mahayani (1995) hanya menggambarkan bentuk arsitektur yang ada di Dusun Sade yang dipengaruhi oleh konsep religinya, namun tidak menjelaskan perkembangan yang terjadi pada bentuk-bentuk tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, selain faktor kepercayaan. Berbeda dengan studi yang dilakukan, karena selain berbeda lokasi studi dan karakteristik geografis wilayahnya, studi ini menggambarkan tentang perkembangan yang terjadi pada permukiman di Dusun Senaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, studi yang dilakukan ini juga akan memberikan

suatu rekomendasi yang berupa arahan pelestarian untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi, sehingga konsep-konsep dan nilai-nilai yang terkandung di dalam permukiman tersebut tidak hilang. Penelitian yang dilakukan Mahayani (1995) dapat dijadikan bahan masukan pada Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru dalam hal mengkaji aspek kebudayaan terutama pada sistem religinya dan memperkaya kajian terhadap permukiman tradisional di Dusun Senaru karena berkarakteristik penghuni yang sama, yaitu masayarakat Sasak.

2. Ibnu Sasongko (2002)

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2003) yang berjudul "Relasi Kuasa dalam Struktur Ruang Permukiman Sasak, Kasus : Permukiman Sasak" bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi suatu perubahan pada struktur ruang dengan membandingkan antara Desa Bayan dengan Desa Puyung terkait dengan sistem kuasa. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa pemukiman Sasak memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan yang ada. Perubahan kepercayan, pola perkawinan, juga semakin berperannya ekonomi dan teknologi tidaklah serta merta mereka kehilangan identitas dalam konteks struktur ruang permukiman mereka. Penghormatan pada senior, toleransi antar penghuni keserasian antar elemen sejauh ini masih tetap terjaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2003) berbeda dengan studi yang dilakukan dalam hal lokasi studi dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Pada penelitian Sasongko (2003) adalah ingin mengetahui apakah adanya perunahan struktur ruang permukiman terhadap relasi kuasanya. Pada penelitian Dusun Senaru memliki tujuan akhir berupa strategi pelestarian serta arahan kebijaksanaan perencanaan kawasan. Walaupun demikian penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2003) dapat digunakan sebagai masukan dalam menidentifikasi karakteristik permukiman di Dusun Senaru, terutama dalam hal pola permukimannya.

3. Parino Rahardjo (2004)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2004) yang berjudul "Analisis Pola Permukiman Desa Tradisional Segenter Lombok" bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi suatu perubahan tata kehidupan dan permukiman pada Desa Tradisional Segenter Lombok di dalam era informasi yang demikian majunya. Hasil akhir dari penelitian menggambarkan bahwa Desa Segenter telah memiliki kebudayaan yang cukup maju dalam hal penataan permukiman, susunan rumah yang berderet rapi dan diperkuat oleh jalan yang cukup lebar dan bersilangan, mempertegas pola *gridiron.* Pengkandangan ternak dengan pola dalam satu tempat memberi pengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat desa dan

memudahkan pengontrolan dan pengawasan ternak. Penghuni desa yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik di antaranya telah mampu memperbaiki rumah mereka dengan menggunakan bahan bangunan modern walau hanya terbatas untuk lantai dan umpak bangunan. Penggunaan jendela untuk penerangan alami di siang hari dan sirkulasi udara mulai dikenal, walau hanya terbatas pada rumah yang telah diperbaiki. Bentuk rumah yang mengalami perbaikan tetap mempertahankan bentuk asal dan antara dua buah rumah saling berhadapan dengan *beruga'* berada di tengahnya. Secara keseluruhan pola permukiman Desa Segenter tetap seperti sedia kala dengan tetap mempertahankan pola *gridiron.*

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadjo (2004) berbeda dengan studi yang akan dilakukan dalam hal karakteristik lokasi dan pendekatan yang dilakukan. Rahardjo (2004) melakukan penelitian pada permukiman tradisional yang berada di daerah perbukitan dengan tapak datar, sedangkan studi di Dusun Senaru berada pada daerah pegunungan (kaki Gunung Rinjani) namun tapaknya tidak datar dan menggunakan pendekatan sejarah melalui metode deskriptif-ekploratif untuk menggali perubahan-perubahan yang terjadi pada pola permukiman dan bangunannya. Walaupun demikian, studi Rahardjo (2004) ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengidentifikasi pola permukiman di Dusun Senaru, karena baik Dusun Segenter maupun Dusun Senaru adalah berada pada Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Bayan dan dihuni oleh penduduk asli Lombok, yaitu Suku Sasak.

4. Ibnu Sasongko (2002)

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2002) yang berjudul "Transformasi Struktur Ruang Pada Permukiman Sasak, Kasus: Permukiman Tradisional Desa Puyung" bertujuan untuk mengetahui transformasi struktur ruang pada permukiman tradisional di Desa Puyung yang terletak di jalan utama Pulau Lombok (antara Mataram-Praya dan menuju Pantai Kuta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman tradisional Sasak, khususnya di Desa Puyung pada sebagian kecil wilayah, yakni beberapa *repoq* menunjukkan tidak berubahnya struktur ruangnya meskipun terdapat perubahan yang mendasar dalam kebudayaan masyarakatnya, setidaknya pandangan hidup dan agama yang dianut dari Islam Waktu Telu ke Islam. Meskipun demikian pengaruh adat Sasak masih melekat dengan kuat, baik dalam kegiatan ritual budaya maupun implementasinya secara fisik. Dalam hal struktur ruang juga ternyata dipengaruhi oleh strata masyarakatnya, yakni dari adanya kaum bangsawan dan rakyat biasa. Pengaruh kaum bangsawan terhadap rakyat masih kuat, yakni dalam membentuk opini yang diikuti masyarakat. Dalam pelaksanaan

pembangunan maka pengaruh dukun dan tetua desa sangat penting, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk struktur ruang di Desa Puyung. Perkembangan pemahaman agama dan pengaruh ekonomi serta masuknya orang luar menjadikan transformasi struktur ruang yang mendasar di Puyung, khususnya menyangkut pembentukan dan pemilihan ruang kegiatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2002) berbeda dengan studi yang dilakukan di Dusun Senaru, yakni dalam hal hasil akhirnya karena studi di Dusun Senaru akan memberikan arahan pelestarian pada permukiman tradisionalnya berdasarkan hasil temuan di lapangan yang juga mencakup perubahan pada pola permukiman dan bangunannya. Namun, studi Sasongko (2002) ini dapat menjadi bahan masukan mengenai perubahan-perubahan ruang pada permukiman tradisional Sasak, yang juga merupakan suku yang mendiami Dusun Senaru.

5. Ibnu Sasongko (2005)

Penelitian yang dilakukan Sasongko (2005) dengan judul "Pembentukan Struktur Ruang Permukiman Berbasis Budaya, Studi Kasus : Desa Puyung, Lombok Tengah" bertujuan untuk mengetahui pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya Sasak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinasi budaya Sasak di Desa Puyung muncul pada ruang permukiman, menunjukkan adanya struktur ruang. Seting dan cakupan ruang dalam peristiwa ritual pada dasarnya beragam, serta menunjukaan adanya penggunaan ruang yang tetap dan temporal. Selain itu, ritual daur hidup yang temporal menghasilkan struktur ruang yang temporal pula, maka keberlanjutan acara ritual adalah acara kunci. Bila pelaksanaan ritual hilang maka akan struktur uang permukiman juga akan berubah atau hilang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2005) berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Dusun Senaru, yakni dalam tujuan dan hasil akhir ingin dicapai. Pada penelitian Sasongko (2005) menekankan dan ingin mengetahui pembentukan struktur ruang permukiman masyarakat Sasak dengan berbasis budaya Sasak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan di Dusun Senaru adalah ingin merekomendasikan terhadap arahan perencanaan kawasannya dengan berdasarkan arahan pelestarian terhadap aspek sosial dan budaya masayarakat Sasak dan pola permukiman dan bangunan. Namun studi yang dilakukan oleh Sasongko (2005) dapat membantu penelitian di Dusun Senaru dalam hal mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan dengan mempertimbangkan arahan pelestarian pembentukan struktur ruang permukiman masyarakat sasak d Dusun Senaru.

6. Fariz Primadi Hirsan (2005)

Penelitian yang dilakukan oleh Hirsan (2005) yang berjudul "Pola Bermukim Masyarakat Suku Sasak yang dipengaruhi Oleh Sistem Kekerabatan" memiliki tujuan melihat pengaruh sistem kekerabatan terhadap pola bermukim masyarakat Desa Puyung. Dari hasil temuannya di lapangan menunjukaan bahwa pengaruh unsur budaya terutama sistem kekerabatan sangat mempengaruhi pola bermukim masyarakat Sasak. Untuk pola arah membangun rumah, bagi orang tua/orang yang dituakan di suatu rumpun dianggap penting karena mereka dianggap sebagai orang yang paling mengerti tentang apapun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penentuan arah pola membangun yang ada di tiap rumpun tersebut tergantung dari posisi rumah orang tersebut.

Penelitian yang dilakukan Hirsan (2005) berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Dusun Senaru. Perbedaannya terletak pada baik tujuan maupun akhir penelitian mengindikasikan bahwa sistem kekerabatan sangat mempengaruhi pola bermukim masyarakat Suku Sasak, dan penelitian yang dilakukan di Dusun Senaru selain mengkaji sistem kekerabatannya juga mengkaji aspek sosial budaya lainnya dan pola permukiman dan bangunannya secara lingkup kawasan. Penelitian Hirsan (2005) dapat menjadi bahan masukan dalam membantu mengkaji keterkaitan sistem kekerabatan pada pola pembangunan rumah di Dusun senaru.

7. Sukawi dan Moch. Setiawan (2002)

Penelitian yang dilakukan oleh Sukawi & Setiawan (2002) yang berjudul "Arsitektur Tradisional Timor Lorosae" bertujuan untuk mempelajari karakteristik bangunan arsitektur tradisionai Timor Lorosae untuk mendapatkan prinsip-prinsip adaptasi bangunan dengan alam/iklim tropis serta budaya yang menyertainya. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dalam pembahasannya, diperoleh hasil akhir bahwa budaya masyarakat setempat mempengaruhi bangunan tradisional yang didirikan, antara lain dalam hal simbolisasi bentuk rumah, pemilihan lokasi permukiman, arah orientasi, serta pola permukimannya. Selain itu, faktor iklim juga ikut mempengaruhi bentuk rumah, yaitu bentuk panggung untuk menghindari kelembaban tinggi dan memudahkan pengawasan terhadap serangan binatang. Rumah-rumah tersebut tidak berjendela karena hanya digunakan untuk tidur pada malam harinya. Pola hunian yang berkelompok dengan banguan yang tidak rapat membantu aliran angin/pergerakan udara, sedangkan konstruksi yang didominasi oleh kayu dan daun dengan batu sebagai pondasinya dikaitkan dengan segi ekonomi (murah dan mudah didapat), segi ekologi (bahan-bahan tersebut dapat diperbaharui), segi keawetan (tahan terhadap rayap dan jamur), segi estetika (mempunyai warna yang alami) serta segi

fisika bangunan (bahan-bahan tersebut merupakan penghantar panas yang jelek). Pola kehidupan masyarakatnya belum banyak berubah karena lambatnya pengaruh dari luar yang masuk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana transportasi, informasi dan teknologi serta kondisi alamnya yang kurang mendukung.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukawi&Setiawan (2002) berbeda dengan studi yang dilakukan di Dusun Senaru, dalam hal lokasi maupun pendekatan yang digunakan. Studi yang dilakukan menggunakan pendekatan sejarah dengan metode eksploratif untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada pola permukiman dan bangunan di Dusun Senaru, dan hasil akhirnya berupa rekomendasi terhadap tindakan pelestarian di daerah tersebut. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sukawi & Setawan ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan perbandingan mengenai untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan lokasi permukiman, bentuk rumah serta bahan-bahan yang digunakan.

8. Abdul Mufti Radja, Nindyo Soewarno, Laretna T. Adhisakti (2000)

Penelitian yang dilakukan oleh Radja *et al.* (2000) yang berjudul "Keragaman Rumah Tradisional Makasar di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan" bermaksud untuk mengkaji keragaman rumah tradisional Makasar dan faktor faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pelestarian bangunan maupun pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif rasionalistik dalam analisisnya dengan menggunakan teknik *purposive sampling.* Dari hasil akhirnya diperoleh gambaran bahwa rumah tradisional Makasar dibangun sendiri oleh masyarakat dengan tata cara adat tradisi yang dikerjakan bergotong royong , spasial rumah secara vertikal terbagi menjadi tiga yang juga diidentikkan dengan alam semesta yang terbagi menjadi tiga. Stratifikasi sosial yang dimiliki oleh pemilik rumah berpengaruh terhadap jenis *timba silla* dan arah perletakan tangga, sedangkan faktor kepercayaan berpengaruh terhadap orientasi bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Radja *et al.* (2000) ini berbeda dengan studi yang dilakukan di Dusun Senaru, antara lain dalam hal karakteristik lokasi serta pendekatan yang dilakukan. Studi yang dilakukan oleh Radja *et al.* (2000) berada di daerah yang relatif datar, sedangkan studi di Dusun Senaru memiliki karakteristik permukiman di daerah pegunungan dan dengan mengunakan pendekatan sejarah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang terjadi di dusun tersebut. Walaupun demikian, penelitian Radja *et al.* (2000) dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rumah-rumah tradisional.

9. Ishak Kadir, Nindyo Soewarno, Gunung Radjiman (2002)

Penelitian yang dilakukan oleh Kadir *et al.* (2002) yang berjudul "Kesinambungan dan Perubahan Spasial Pada Rumah Tradisional Buton di Kawasan Benteng Kraton Buton Sulawesi Tenggara" bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan budaya yang dikaitkan dengan perubahan rumah tradisional Buton yang tercermin pada cara penataan ruang di dalam dan di luar rumah tinggal. Dengan menggunakan metode kualitatif rasionalistik diperoleh hasil akhir bahwa kesinambungan dan perubahan spasial pada rumah tradisional Buton dapat dilihat dari aktifitas sehari-hari maupun yang bersifat adat, organisasi ruang, hirarki ruang, fungsi ruang dan orientasi rumah. Salah satu faktor sosial yang mengendalikan terjadinya perubahan rumah tradisional Buton, yaitu aturan dalam membangun rumah yang intinya melarang pembangunan rumah selain rumah tradisional dengan struktur panggung. Status tanah adat di dalam benteng sebagai hak pakai berpengaruh terhadap pembangunan rumah tinggal yang cenderung tidak permanen.

Faktor budaya masyarakat Buton tercermin dalam bentuk kegiatan tradisi adat yang bersifat temporal maupun pada pola aktifitas kegiatan sehari-hari. Pola dan aturan dalam menggunakan ruang berpengaruh terhadap kesinambungan pola organisasi niang yang tetap mempertahankan tiga bagian inti, yaitu ruang *bamba*, *tanga* dan suo. Perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari homogen menjadi heterogen berpengaruh terhadap perkembangan tata fisik rumah tinggal. Kondisi ekonomi yang baik memungkinkan untuk melakukan perbaikan dan perubahan rumah. Pengaruh modernisasi dengan kehadiran perlengkapan hidup seperti perabot rumah tangga berpengaruh pada pola penataan fisik rumah dan pola aktifitas di dalam rumah. Kehadiran mobil dan sepeda motor sebagai fasilitas transportasi berpengaruh terhadap perubahan fungsi ruang *kapeo.*

Pengembangan ruang cenderung secara vertikal ke arah bawah didukung oleh kondisi topografi tanah yang berkontur clan berada pada daerah ketinggian sehingga bebas banjir.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadir *et al.* (2000) ini berbeda dengan studi yang akan dilakukan di Dusun Senaru karena tidak membahas tentang upaya pelestarian kawasan tersebut, sedangkan studi yang akan dilakukan hasil akhirnya berupa konsep pelestarian kawasan studi. Walaupun demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan rumah tradisional Buton dapat digunakan sebagai referensi dalam mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada permukiman dan bangunan pada kawasan studi.

10. Asniawaty, Atyanto Dharoko, Djoko Wijono (2001)

Penelitian yang dilakukan oleh Asniawaty *et al.* (2001) yang berjudul "Pola Spasial Permukiman Desa Galesong" bertujuan untuk merumuskan pola spasial permukiman di

Desa Pantai Galesong beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan analisis semiotik dalam pembahasannya, yaitu dengan mengaitkan aspek non fisik Desa Galesong (sistem sosial budaya) dan aspek fisik (kondisi lingkungan) dengan pola spasial permukiman desa. Hasil akhir penelitian ini adalah berupa gambaran tentang permukiman di Desa Pantai Galesong. Permukiman di desa tersebut terbagi menjadi dua berdasarkan bentuk dan tata letaknya, yaitu kelompok permukiman yang berada di sebelah utara dan kelompok permukiman yang berada di sebelah selatan, yang masing-masing permukiman dibatasi oleh sebuah *open space* desa. Permukiman-penmukiman tersebut memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh sosial budaya dan lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asniawaty *et al.* (2001) berbeda dengan studi yang dilakukan di Dusun Senaru dalam hal lokasi dan pendekatan yang digunakan. Studi yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada pola permukiman dan bangunan di Dusun Senaru, dan hasil akhirnya berupa arahan pelestarian di daerah tersebut, namun analisis yang dilakukan dalam penelitian Asniawaty *et al.* (2001) dengan menggunakan metode semiotik dapat digunakan dalam analisis studi yang dilakukan.

11. Sigmawan Tri Pamungkas (1992)

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (1992) yang berjudul "Evolusi Tata Ruang Desa Wonokitri" bertujuan untuk menerangkan evolusi sosio kultur yang terjadi di Desa Wonokitri sebagai salah satu daerah wisata alam budaya di kawasan Tengger. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pendekatan arsitektural, historis, antropologis, sosiologis dengan hasil akhir bahwa Desa Wonokitri memiliki pola permukiman berbentuk *cluster* linear dengan perletakan bangunan yang mengelompok dan memanjang disesuaikan dengan kondisi topografinya yang berteras-teras serta berorientasi ke jalan utama maupun lingkungan sebagai jalur akses fungsional. Jarak perletakan bangunan rumah umumnya rapat (rata-rata antara 2-3 m) dan tidak dipisahkan oleh suatu batas yang tegas (pagar). Selain oleh bangunan rumah tinggal dan jaringan jalan tersebut, struktur ruang permukiman terbentuk pula oleh fasilitas-falititas umum. Permukiman di Desa Wonokitri ini memilki pola penataan dan hirarki ruang yang mirip dengan desa adat di Bali, antara lain dapat dilihat dari orientasi bangunannya yang mengarah ke Gunung Bromo serta adanya pembagian permukiman menjadi tiga zona yang menggambarkan adanya "tiga status dunia" dengan masingmasing derajat sakralitasnya, yaitu zona utama, tempat pura; zona madya, tempat diletakkan bale banjar dan pohon beringin/lapangan;

serta zona nista, tempat pasar desa. Konsep ini tidak terlepas dari pengaruh Hindu di desa ini, namun sejalan dengan perkembangannya bangunan di Desa Wonokitri mengalami pergeseran yang disebabkan antara lain oleh adanya pembaharuan Hindu Dharma pada tahun 1950-1970, perkembangan ekonomi di sektor pariwisata serta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur.

Penelitian yang dilakukan, oleh Pamungkas (1992) berbeda dengan studi yang dilakukan di Dusun Senaru karena penelitian tersebut menggambarkan evolusi yang terjadi pada tata ruang permukiman Desa Wonokitri, namun tidak menerangkan perkembangan serta perubahan yang terjadi pada bangunannya, sedangkan studi yang dilakukan di Dusun Senaru menjelaskan perkembangan yang terjadi pada pola permukiman dan bangunannya serta hasil akhirnya berupa rekomendasi arahan pelestarian.

12. Parnomo Atmadi, Y. Djarot Purbadi dan Irina Mildawani (1998)

Penelitian yan dilakukan oleh Atmadi *et al.* (1998) yang berjudul "Early Moeslem Settlements In Trowulan" bertujuan untuk mengidentifikasi pola permukiman muslim di Trowulan yang merupakan ibukota Kerajaan Majapahit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *diachronic* terhadap artefak-artefak permukiman (dari hasil ekskavasi lapangan) dan permukiman sekarang yang dibangun oleh masyarakat di Trowulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pola atau cluster rumah-rumah yang khusus di Trowulan, yang didasarkan pada hubungan kekerabatan. Rumah-rumah di Trowulan dibangun da dimiliki oleh keluarga-keluarga dengan hubungan kekerabatan yang sangat dekat karena berasal dari kakek dan nenek yang sama. Masing-masing rumah dihuni oleh orang tua dan anak-anaknya. Hubungan kekerabatan di antara mereka tersebut didasarkan pada ketentuan yang selama ini diyakini, yaitu bahwa anak terakir dari suatu komunitas tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang/pihak yang tinggal di jalan/gang yang sama. Jadi mereka harus menikahi orangdari komunitas yang berbda dan berada di luar jalan/gang tempat tinggalnya.

Penelitian Atmadi *et al.* (1998) berbeda dengan studi yang dilakukan di Dusun Senaru, baik dalam metode pendekatan maupun karakteristik lokasinya, namun penelitian Atmadi et al. (1998) ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara hubungan kekerabatan dengan pola persebaran rumah di Dusun Senaru.

13. Sulistyawati (1998)

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati *(1998)* yang berjudul "Konservasi Desa Kuna Dalam Antisipasi Pariwisata (Studi Kasus: Tenganan Pegeringsingan)" dimaksudkan untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana usaha-usaha konservasi yang dilakukan masyarakat

Tenganan untuk melestarikan lingkungan binaannya yang meliputi pola rumah dan pola desa tradisionalnya dari pengaruh pariwisata. Dengan menggunakan pendekatan budaya, diperoleh hasil bahwa usaha korservasi lingkungan yang dihasilkan oleh Panitia perumusan Pelestarian Desa Adat Tenganan Pegeringsingan sudah detil dan mencakup permasalahan krusial yang dihadapi, namun hal tersebut belum menjamin untuk ditaati oleh warga karena adanya beberapa kelemahan dari ketetapan tersebut, seperti tentang penerapan sanksi yang belum diatur dengan tegas menyangkut siapa yang berhak mengawasi dan bentuk sanksi yang harus dikenakan kepada pelanggar.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati (1998) berbeda dengan studi yang dilakukan, dalam hal pendekatan yang digunakan dan hasil akhirnya. Jika penelitian tersebut menggunakan pendekatan budaya maka studi yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dengan hasil akhir berupa arahan pelestarian. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati ini memberikan masukan bahwa dalam upaya pelestarian, tata nilai serta aturan adat yang berlaku di dalam suatu masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelestarian.

Tabel 2.6 Studi Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis Penelitian	Tujuan dan Hasil Akhir Penelitian	Metode Pendekatan Yang Digunakan	Perbedaan dengan Penelitian "Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru"	Masukan Terhadap Penelitian Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru
1.Sri Agustina Mahayani (1995) Bentuk-bentuk Arsitektur dan Konsep Religi Pendukungnya di Permukiman Suku Sasak Dusun Sade, Lombok, NTB	• **Tujuan:** gambaran mengenai bentuk tata ruang permukiman, bangunan dan tata ruang dalam rumah serta konsep-konsep yang melatarbelakanginya • **Hasil Akhir:** penggambaran bentuk arsitektur dan pemilihan lokasi permukiman di Dusun Sade dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap kosmos, faktor keamanan dan faktor kesuburan tanah	Metode etnoarkeologi yaitu pendekatan pada aspek arkeologi untuk mengetahui pengaruh kepercayaan yang berkembang dalam masyarakatnya terhadap bentuk yang dihasilkan	• Perbedaan lokasi studi, karakteristik geografis • **Metode Pendekatan** :Pendekatan deskriptif • **Tujuan** : Mengkaji perkembangan yang terjadi di Dusun Senaru dan faktor yang mempengaruhi mengenai permaslahan pelestarian yang ada di Dusun Senaru • **Hasil Akhir :** Arahan Pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan di Dusun Senaru	Kajian aspek kebudayaan terutama pada sistem religinya dan memperkaya kajian terhadap permukiman tradisional di Dusun Senaru karena berkarakteristik penghuni yang sama, yaitu masayarakat Sasak.
2.Parino Rahardjo (2004) Analisis Pola Permukiman Desa Tradisional Segenter Lombok	• **Tujuan:** mengetahui apakah terjadi perubahan tata kehidupan dan permukiman pada Desa Segenter Lombok dalam era informasi • **Hasil Akhir:** Desa Segenter telah memiliki kebudayaan yang cukup maju dalam hal penataan permukiman, susunan rumah yang berderet rapi dan diperkuat oleh jalan yang cukup lebar dan bersiiangan, mempertegas pola *gridiron*, dan pola permukimannya masih terpelihara seperti sedia kala	-	• Perbedaan lokasi studi, karakteristik geografis • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya dan pola permukiman dan bangunan • **Hasil Akhir :** Arahan Pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan di Dusun Senaru	Bahan masukan untuk mengidentifikasi pola permukiman di Dusun Senaru, karena Dusun Segenter dan Dusun Senaru berada pada Kecamatan Bayan dan dihuni oleh Suku Sasak
3.Ibnu Sasongko (2002) Transformasi Struktur Ruang Pada Permukiman Sasak, Kasus:	• **Tujuan:** mengetahui transformasi struktur ruang pada permukiman tradisional		**Hasil:** memberikan arahan pelestarian dan perubahan pola permukimannya	Bahan masukan mengenai perubahan-perubahan ruang pada permukiman tradisional

Lanjutan Tabel 2.6 Sudi Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis Penelitian	Tujuan dan Hasil Akhir Penelitian	Metode Pendekatan Yang Digunakan	Perbedaan dengan Penelitian "Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru"	Masukan Terhadap Penelitian Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru
Permukiman Tradisional Desa Puyung	• **Hasil Akhir:** Desa Puyung tidak mengalami perubahan pada struktur ruangnya			Sasak, yang juga merupakan suku yang mendiami Dusun Senaru.
3. Parino Raharjo (2004) Analisis Pola Permukiman Desa Tradisional Segenter Lombok	• Tujuan : mengetahui apakah terjadi suatu perubahan tata kehidupan dan permukiman pada Desa Tradisional Segenter Lombok di dalam era informasi yang demikian majunya • Hasil Akhir: Desa Segenter telah memiliki kebudayaan yang cukup maju dalam hal penataan permukiman, susunan rumah yang berderet rapi dan diperkuat oleh jalan yang cukup lebar dan bersiiangan, mempertegas pola *gridiron*	Metode Deskriptif-Eksploratif	• Perbedaan karakteritik lokasi studi, karakteristik geografis • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budayanya dan pola permukiman dan bangunan • **Hasil Akhir :** Arahan Pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan di Dusun Senaru	Bahan masukan untuk mengidentifikasi pola permukiman di Dusun Senaru
4. Ibnu Sasongko (2005) Transformasi Struktur Ruang Pada Permukiman Sasak, Kasus: Permukiman Tradisional Desa Puyung	• **Tujuan:** mengetahui transformasi struktur ruang pada permukiman tradisional di Desa Puyung • **Hasil akhir :** Perkembangan pemahaman agama dan pengaruh ekonomi serta masuknya orang luar menjadikan transformasi struktur ruang yang mendasar di Puyung, khususnya menyangkut pembentukan dan pemilihan ruang kegiatannya	-	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil :** Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	Kajian dalam pembentukan transformasi struktur ruang permukiman terhadap pembentukan bangunan-bangunan baru
5. Ibnu Sasongko (2005) Pembentukan Struktur Ruang	• **Tujuan :** mengetahui pembentukan struktur ruang	-	• Perbedaan karakteristik lokasi studi	Kajian dalam pembentukan struktur ruang permukiman

Lanjutan Tabel 2.6 Sudi Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis Penelitian	Tujuan dan Hasil Akhir Penelitian	Metode Pendekatan Yang Digunakan	Perbedaan dengan Penelitian "Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru"	Masukan Terhadap Penelitian Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru
Permukiman Berbasis Budaya, Studi Kasus : Desa Puyung, Lombok Tengah	permukiman berbasis budaya Sasak • **Hasil Akhir:** determinasi budaya Sasak di Desa Puyung muncul pada ruang permukiman, menunjukkan adanya struktur ruang		• **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil :** Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	terhadap pembentukan bangunan-bangunan baru terhadap ritual-ritual hidup masyarakat Sasak di Dusun Senaru
6. Fariz Primadi Hirsan (2005) Pola Bermukim Masyarakat Suku Sasak yang dipengaruhi Oleh Sistem Kekerabatan	• **Tujuan :** melihat pengaruh sistem kekerabatan terhadap pola bermukim masyarakat Desa Puyung • **Hasil akhir:** pengaruh unsur budaya terutama sistem kekerabatan sangat mempengaruhi pola bermukim masyarakat Sasak	-	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Tujuan** : menggali informasi aspek sosial budaya lainnya selain sistem kekerabatan dan pola permukiman dan bangunan • **Hasil** : Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	Membantu dalam mengkaji keterkaitan sistem kekerabatan pada pola pembangunan rumah di Dusun senaru
7.Sukawi dan Moch. Setiawan (2002) Arsitektur Tradisional Timor Lorosae	• **Tujuan :** untuk mendapatkan prinsip-prinsip adaptasi bangunan dengan alam/iklim tropis serta budaya yang menyertainya • **Hasil akhir** : budaya masyarakat setempat mempengaruhi bangunan tradisional yang didirikan	Metode Analisis Deskriptif	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil Akhir :** Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	Kajian dalam aspek bangunan khususnya dalam mengkaji orientasi ruang permukiman ditinjau dari aspek budaya.
8. Abdul Mufti Radja, Nindyo Soewarno, Laretna T. Adhisakti (2000)	• **Tujuan :** mengkaji keragaman rumah tradisional Makasar dan faktor faktor yang	Metode pendekatan kualitatif rasionalistik	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Metode pendekatan**:	Bahan masukan dan perbandingan dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi

Lanjutan Tabel 2.6 Sudi Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis Penelitian	Tujuan dan Hasil Akhir Penelitian	Metode Pendekatan Yang Digunakan	Perbedaan dengan Penelitian "Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru"	Masukan Terhadap Penelitian Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru
Keragaman Rumah Tradisional Makasar di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	mempengaruhinya • **Hasil Akhir:** menentukan kebijakan-kebijakan pelestarian bangunan maupun pengembangannya		Penelitian deskriptif • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil Akhir :** Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	perkembangan rumah-rumah tradisional
9. Ishak Kadir, Nindyo Soewarno, Gunung Radjiman (2002)	• **Tujuan:** mengidentifikasi perubahan budaya yang dikaitkan dengan perubahan rumah tradisional Buton yang tercermin pada cara penataan ruang di dalam dan di luar rumah tinggal • **Hasil Akhir:** kesinambungan dan perubahan spasial pada rumah tradisional Buton dapat dilihat dari aktifitas sehari-hari maupun yang bersifat adat, organisasi ruang, hirarki ruang, fungsi ruang dan orientasi rumah	Metode kualitatif rasionalistik	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Metode pendekatan**: Penelitian deskriptif • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil Akhir :** Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan rumah tradisional Buton dapat digunakan sebagai referensi dalam mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada permukiman dan bangunan pada kawasan studi.
10. Asniawaty, Atyanto Dharoko, Djoko Wijono (2001) Pola Spasial Permukiman Desa Galesong	• **Tujuan:** merumuskan pola spasial permukiman di Desa Pantai Galesong beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya • **Hasil akhir:** gambaran tentang permukiman di Desa Pantai Galesong	Metode analisis semiotik	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Metode pendekatan**: Penelitian deskriptif • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil Akhir :** Arahan pelestarian dan rekomendasi	Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode semiotik dapat digunakan dalam analisis studi yang dilakukan

Lanjutan Tabel 2.6 Sudi Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis Penelitian	Tujuan dan Hasil Akhir Penelitian	Metode Pendekatan Yang Digunakan	Perbedaan dengan Penelitian "Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru"	Masukan Terhadap Penelitian Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru
			terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	
11. Sigmawan Tri Pamungkas (1992) Evolusi Tata Ruang Desa Wonokitri	• **Tujuan;** menerangkan evolusi sosio kultur yang terjadi di Desa Wonokitri sebagai salah satu daerah wisata alam budaya di kawasan Tengger • **Hasil Akhir:** Desa Wonokitri memiliki pola permukiman berbentuk *cluster* linear dengan perletakan bangunan yang mengelompok dan memanjang disesuaikan dengan kondisi topografinya yang berterasteras serta berorientasi ke jalan utama maupun lingkungan sebagai jalur akses fungsional	Pendekatan arsitektural, historis, antropologis, sosiologis	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Metode pendekatan**: Penelitian deskriptif • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil Akhir :** Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	-
12. Parnomo Atmadi, Y. Djarot Purbadi dan Irina Mildawani (1998) Early Moeslem Settlements In Trowulan	• **Tujuan :** mengidentifikasi pola permukiman muslim di Trowulan yang merupakan ibukota Kerajaan Majapahit • **Hasil Akhir:** indikasi pola atau cluster rumah-rumah yang khusus di Trowulan, yang didasarkan pada hubungan kekerabatan	Metode pendekatan *diachronic*	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Metode pendekatan**: Penelitian deskriptif • **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil Akhir :** Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	Bahan masukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara hubungan kekerabatan dengan pola persebaran rumah di Dusun Senaru
13. Sulistyawati (1998) Konservasi Desa Kuna Dalam Antisipasi Pariwisata (Studi Kasus: Tenganan	• **Tujuan:** mengidentifikasi sampai sejauh mana usaha-usaha konservasi yang dilakukan masyarakat	Metode pendekatan budaya	• Perbedaan karakteristik lokasi studi • **Metode pendekatan**: Penelitian deskriptif	Masukan bahwa dalam upaya pelestarian, tata nilai serta aturan adat yang berlaku di dalam suatu masyarakat

Lanjutan Tabel 2.6 Sudi Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis Penelitian	Tujuan dan Hasil Akhir Penelitian	Metode Pendekatan Yang Digunakan	Perbedaan dengan Penelitian "Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru"	Masukan Terhadap Penelitian Studi Pelestarian Dusun Wisata Tradisional Senaru
Pegeringsingan)	Tenganan untuk melestarikan lingkungan binaannya yang meliputi pola rumah dan pola desa tradisionalnya dari pengaruh pariwisata • **Hasil Akhir:** usaha korservasi lingkungan yang dihasilkan oleh Panitia perumusan Pelestarian Desa Adat Tenganan Pegeringsingan sudah detil dan mencakup permasalahan krusial yang dihadapi, namun hal tersebut belum menjamin untuk ditaati oleh warga karena adanya beberapa kelemahan dari ketetapan tersebut, seperti tentang penerapan sanksi yang belum diatur dengan tegas menyangkut siapa yang berhak mengawasi dan bentuk sanksi yangharus dikenakan kepada pelanggar		• **Tujuan :** menggali informasi mengenai aspek sosial budaya pola permukiman dan bangunan Dusun Senaru • **Hasil Akhir :** Arahan pelestarian dan rekomendasi terhadap arahan perencanaan kawasan Dusun Senaru	merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelestarian

Sumber : Tinjauan terhadap Referensi dan Penelitian Terdahulu, 2005

PELESTARIAN KAWASAN PERMUKIMAN TRADISIONAL DI DUSUN SENARU

Studi Penelitian Terdahulu

Tinjauan Mengenai Karakateristik

- UNSUR BUDAYA (Koentjaraningrat (1987:12)
  - Sistem Pengetahuan;
  - Sistem Religi atau kepercayaan;
  - Kesenian;
  - Organisasi Sosial;
  - Sistem Matapencaharian
- HUBUNGAN KEKERABATAN (Hirsan, 2005:40) hubungan kekerabatan pada masyarakat Suku Sasak merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi tempat tinggal
- SIMBOLISME KEKUASAAN (Sasongko, 2005:25) Senioritas dalam keluarga ditunjukkan dalam tatanan ruang perumahan
- POLA PERMUKMAN DAN BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU WUJUD KEBUDAYAAN FISIK (Rapoport *dalam* Wikantiyoso (1997:26) permukiman tradisional merupakan manifestasi dari nilai sosial budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai sosial budaya

Tinjauan Teori Penyusunan Konsep dan Strategi

- ORIENTASI KARAKTER RUANG (Hirsan, 2005:44)
  - Orientasi Penggunaan *Private*
  - Orientasi Penggunaan *Semi Public*
  - Orientasi Penggunaan *Public*
- CITRA KAWASAN (Lynch *dalam* Zahd, 1999:157-162)
  - Jalur (Path)
  - Tepian (Edge)
  - Kawasan (District)
  - Simbol (Node)
  - Tengeran (Landmark)
- PERMASALAHAN DALAM UPAYA PELESTARIAN (Catanese & Snyder, 1992:429) Aspek hukum Pendanaan Pengelolaan
- PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAWASAN PELESTARIAN DALAM KONTEKS PERENCANAAN KAWASAN Widayati (2000:93-95) peran aktif masyarakat dalam suatu upaya pelestarian merupakan hal yang penting
- STRUKTUR RUANG PERMUKIMAN MASYARAKAT SASAK (Sasongko, 2005:48)
  - Ritual Kelahiran
  - Ritual Perkawinan
  - Ritual Maulid Nabi
- *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS*/AHP (Saaty, 1993)
  - Prinsip dasar AHP
  - Langkah dasar AHP
- ANALISIS SWOT
  - Matriks SWOT
  - Kuadran SWOT

Arahan Pelestarian

- BENTUK-BENTUK PELESTARIAN (Catanese & Snyder (1992) Nurmala (2003)Siregar (1998); Setiawan (1998))
  - Preservasi
  - Konservasi
  - Restorasi
  - Rehabilitasi
  - Renovasi
  - Rekonstruksi
  - Adaptasi
  - Replikasi
  - Substitusi
  - Benefisasi
  - Perlindungan wajah bangunan
  - Perlindungan garis cakrawala atau ketinggian
- PRINSIP -PRINSIP LANDASAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN UNTUK MENCAPAI TINGKAT KESESUAIAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PERILAKU MANUSIA, SOSIO-KULTURAL (BUDAYA) DAN LINGKUNGAN BERMUKIM (Rapoport, 1979a)
- PRINSIP-PRINSIP LANDASAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA DENGAN SIGNIFKANSI BUDAYA BERDASARKAN PIAGAM INTERNASIONAL OBJEK WISATA DENGAN SINIFIKANSI BUDAYA

Gambar 2.6 Kerangka teori